

HASIL PENELITIAN

**Narasi Berebut Ummat:
Konstruksi Wacana Mengenai Politik Identitas ‘ke-islam-an’
pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Sosial media
di Indonesia**



**Ahmad Ismail
NPM. 023181001**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**NARASI BEREPUT UMMAT:
KONSTRUKSI WACANA POLITIK IDENTITAS 'KE-ISLAM-AN'
PADA PEMILIHAN PRESIDAN TAHUN 2019 DI MEDIA SOSIAL
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

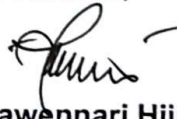
AHMAD ISMAIL

E023181001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,



Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA.
Nip. 195912311986091002

Co. Promotor,



Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si
Nip. 196201181987021001

Plt. Ketua Program Studi
Antropologi,



Dr. Yahya, MA
Nip. 196212312000121001

Co. Promotor,



Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.
Nip. 197508232002121002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. phil. Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 197508182008011008

PERTANYAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ismail
Nomor Mahasiswa : E023181001
Prodi : Ilmu Antropologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terdapat Sebagian dan atau keseluruhan disertasi ini dengan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Desember 2022

Yang menyatakan,


Ahmad Ismail

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kehendak-Nya pula, naskah disertasi ini dapat diselesaikan, meskipun tak luput dari berbagai kekurangan yang ada. Disertasi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana Antropologi Departemen Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin.

Penelitian tentang Narasi Berebut Ummat: Konstruksi Wacana Mengenai Politik Identitas 'ke-islam-an' pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Sosial media di Indonesia merupakan penelitian pengembangan dari penelitian tesis saya pada tahun 2012 terkait dengan Gerakan sosial dan kaitannya dengan adopsi teknologi informasi, dalam hal ini sosial media. Dimana pada tahun 2012 menggunakan pendekatan *connected ethnography* yang diperkenalkan oleh Scimier (2010) sedangkan pada penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan *netnography*, yang diperkenalkan oleh Robert Kozinet (2010).

Melalui kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih tak terhingga kepada masing-masing:

1. Tim Promotor yang terdiri dari Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA, selaku Promotor, Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, selaku Co-Promotor 1, dan Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, selaku Co-Promotor 2.
2. Kepada Bapak Dekan FISIP Universitas Hasanuddin pada saat penulis menjadi mahasiswa baru periode 2018 – 2022, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.

3. Kepada Bapak Dekan FISIP Universitas Hasanuddin periode tahun 2022 – 2026 pada saat penulis menyelesaikan studi, Dr. phil. Sukri, S.IP.,M.Si.
4. Kepada staf pengajar Program Doktor Ilmu Antropologi: (Alm) Prof. Dr. Yamin Sani, MS., Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA., Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA., Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA., Prof. Dr. Hamka Naping, MA., Prof. Dr. Ansar Arifin, MS., Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D., (Alm) Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA., Dr. Muhammad Basir, MA., Dr. Yahya, MA., Dr. Tasrifin Tahara, M.Si., dan Dr. Safriadi, M.Si.
5. Kepada seluruh staf tenaga Pendidikan dilingkup fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
6. Kepada ketua dan Sekretaris Departemen Antropologi FISIP Unhas, Dr. Yahya, MA., dan Muhammad Neil, S.Sos.,M.Si
7. Kepada Ketua Program Studi S3 Ilmu Antropologi, yakni Bapak Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.
8. Kawan-kawan di Yayasan Antropos Indonesia, dr. Ahmad Harun Muchsin, Sp.N, Andi Muhammad Yusuf, S.Sos.,M.Si, Jayana Suryana Kembara, S.Sos.,M.Si., Andi Batara Al Isra, S.Sos.MA., Abd. Masli, S.Sos., Rahmat Yasin, S.Sos., Miranda, S.Sos., Irma Saraswati, Milla, Odie Doang, Della Arlinda Birawa, dan Srti Astuti.
9. Ketua AAI dan senegap pengurus Pusat, serta Ketua Pengda AAI Sulawesi Selatan dan senegap pengurus.
10. Kepada kedua orang tua penulis, H. Muhammad Guntur dan Hj. Kasmawati, beserta saudara(i) penulis, yakni: Hj. Nurwahyuni, (Alm) Nuraeny SKM., M.Si., Ahmad Nur, SE., Ahmad Fakhruddin, dan Ahmad

Saiful Haq. Juga kepada kedua mertua penulis, yakni Prof. Dr. Munsir Lampe, MA, dan Hartatie Suardi beserta adik ipar, Purmadingsa Munsir, S.Sos., Yulfita Munsir, S.Psi., dan Putri Nakita Munsir.

11. Terkhusus penulis sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya diucapkan terimakasih kepada istri tercinta, Hardiyanti Munsir, S.Sos., M.Si, dan dua buah hati kami, Nahdah Qurani Ismail dan Panrita Putra Ismail telah memberikan ruang dan waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan disertasi ini.

Terimakasih atas segala bantuannya yang diberikan kepada saya, semoga bantuan yang diberikan kepada saya akan dibalas yang oleh Tuhan yang Maha Esa Allah SWT di dunia dan di akhirat kelak, amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERTANYAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR PETA.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Penetrasi dan Profil Pengguna Internet di Indonesia	1
2. Pilpres 2019: Arena Kontestasi pada Media Baru	7
B. Fokus Penelitian	15
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	16
BAB 2	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. <i>State of iArt</i> iPenelitian	17
B. Dari “ <i>Physical Technology</i> ” iMenuju “ <i>Social Technology</i> ”	21
C. Gerakan Sosial	27
D. Masyarakat Digital “ <i>Netizen</i> ”: Gagasan Konseptual Tentang Ruang Publik	41
E. <i>Cit Cat</i> di Internet sebagai Arena Konstruksi Budaya	49
BAB 3	56
METODE PENELITIAN	56
A. Munculnya Etnografi Interpretivis	56
B. Netnografi	60
C. Etnografi nterpretivis, Netnografi dan Sosial Media	64
D. “ <i>New Site</i> ” sebagai arena Penelitian Lapangan Antropologi	67

E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	70
1. Pendekatan Penelitian	70
2. Teknik Pengumpulan Data	72
3. Analisis Data Lapangan	74
F. Peneliti Sebagai Instrumen Utama sebagai <i>Shifting Field</i>	85
BAB 4	89
MEDIA SOSIAL SEBAGAI SETTING PENELITIAN.....	89
A. Sejarah Teknologi Informasi (Internet) di Indonesia	89
B. Data Penggunaan Teknologi Informasi (Internet) di Indonesia	92
C. Gerakan 212 dan 411: Pemicu Polarisasi Islam VS Non-Islam dalam Politik di Indonesia	98
1. Kronologis dan Latar Belakang Aksi	98
2. Peserta Aksi Bela Islam	103
3. Kondisi saat Aksi 411 dan 212.....	107
BAB 5	114
POLITIK IDENTITAS, KONTESTASI, DAN MEDIA SOSIAL	114
A. Gerakan Islam di Indonesia dalam Membingkai Wacana “Merebut Ummat” di Ruang Publik dan Ruang Publik Digital	114
1. Perkembangan Gerakan Islam di Indonesia	114
2. Narasi Organisasi Islam Arus Utama dan Konservatif di Ruang Publik Digital	122
B. Sirkulasi Pergulatan Wacana Berebut Ummat di Ruang Publik Digital	148
1. Tagar #2019GantiPresiden	148
2. Tagar #Cebong VS #Kampret.....	156
3. Analisis 2 Tagar: #Pro-Khilafah, #2019TetapPancasila.....	160
4. <i>Framing</i> Politik Meme: Jokowi Komunis dan Prabowo Pro-Khalifah	170
5. Proyeksi Politik Identitas Pilpres 2024: #AniesPresiden dan #GanjarPresiden	187
6. Ruang Publik digital sebagai Ruang Kampanye Elektoral	197
7. Massa Terbelah Karena Media Sosial	203

BAB 6	212
KESIMPULAN	212
DAFTAR PUSTAKA	216
LAMPIRAN	226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengguna Internet Berdasarkan Provinsi di Indonesia	2
Gambar 2. Total Penetrasi Pengguna Internet per Wilayah di Indonesia	3
Gambar 3. Data Jumlah Serangan Siber Januari - Agustus 2019/2020	6
Gambar 4. Perkembangan Indikator TIK di Indonesia 2017 - 2021	93
Gambar 5. Persentasi Penduduk Memiliki Telepon Selular 2011-2021	94
Gambar 6. Proporsi Desa/Kelurahan mendapatkan sinyal Selular 2021	96
Gambar 7. Tingkat Penetrasi Intertnet di Indonesia 2021 - 2022.....	97
Gambar 8. Gambar Ahok Membicarakan Surah Al-Maidah 51	99
Gambar 9. Aksi Bela Islam di Monas	107
Gambar 10. Kehadiran Presiden Jokowi ditengah massa ABI 212.....	112
Gambar 11. Tampilan Website Al-Wa'ie	129
Gambar 12. Channel Youtube Terafiliasi HTI	130
Gambar 13. Channel Youtube News Khilaffah Channel	132
Gambar 14. Tampilan Kanal Youtube Fokus Khilafah Channel Reborn	133
Gambar 15. Konten di Kanal Youtube Front TV telah dihapus	136
Gambar 16. Konten Youtube Islamc Brotherhood TV terafiliasi ke Front TV..	137
Gambar 17. Konten Youtube Markaz Syariah terafiliasi ke Front TV.....	137
Gambar 18. Tampilan Website NU Online	139
Gambar 19. Tampilan Kanal Youtube NU Online	140
Gambar 20. Tampilan Kanal YouTube NU Channel	143
Gambar 21. Tampilan Website Muhammadiyah	144
Gambar 22. Tampilan Kanal YouTube Muhammadiyah Channel.....	145
Gambar 23. Twitter Mardani Ali Sera Pencetus #2019GantiPresiden	152
Gambar 24. Meme Jokowi Terkait Aidit PKI.....	170
Gambar 25. Meme Jokowi dan PKI.....	171
Gambar 26. meme Jokowi dan lambang palu arit.....	172
Gambar 27. Meme orang bergerak dengan Jokowi	173
Gambar 28. Meme Jokowi tanpa beban masa lalu	174
Gambar 29. Meme Prabowo-Sandi dengan Khilafah.....	176
Gambar 30. Meme Prabowo Menghina orang Miskin	177
Gambar 31. Meme Prabowo as Naruto.....	178
Gambar 32. Meme Pidato Prabowo	179
Gambar 33. Meme Prabowo berbicara tentang unicorn	180

DAFTAR PETA

Peta 1. Perbincangan #2019Gantipresiden pada satu node.....	153
Peta 2. Perbincangan #2019Gantipresiden VS #Jokowi2periode.....	154
Peta 3. Node utama diskusi Pro-Jokowi dan Pro-Prabowo.....	155
Peta 4. 2 node percakapan Pro-Jokowi tentang #Kampret.....	158
Peta 5. 2 Akun Bot terkait percakapan #Cebong	159
Peta 6. Gambaran lengkap Diskusi (Twiwwar) Cebong dan Kampret.....	160
Peta 7. Analisis Narasi #2019TetapPancasila	163
Peta 8. Analisis Akun dan Narasi #2019TetapPancasila	164
Peta 9. Analisis Akun Khilafah	166
Peta 10. Analisis Akun Khilafah Target #2019GantiPresiden	167
Peta 11. Peta node utama wacana tagar #AniesPresiden.....	189
Peta 12. Peta 3 node utama Jaringan tagar #AniesPresiden	190
Peta 13. Peta 2 node utama yang berhubungan langsung	191
Peta 14. Peta Visualisasi Jaringan #GanjarPresiden.....	192

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Penggunaan Kata Cebong, Kampret, Kadrun, dan BuzzeRp.....	157
Grafik 2. #2019Tetap Pancasila VS Khilafah	162
Grafik 3. Kata kunci Khilafah	162

ABSTRAK

AHMAD ISMAIL. *Narasi Berebut Umat: Konstruksi Wacana Mengenai Politik Identitas 'Keislaman' pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 pada media Sosial di Indonesia.* (dibimbing oleh Pawennari Hijjang, Andi Alimuddin Unde, dan Tasrifin Tahara).

Penelitian ini menggambarkan elaborasi relasi antarberbagai praktik narasi yang hadir bemuansa berebut umat melalui mediasi ruang publik digital dan melihat implikasinya dalam logika "menghadirkan identitas bagi dua kelompok pendukung capres tahun 2019 di Indonesia". Tujuan penelitian ini adalah (1) menggambarkan sejarah dan narasi gerakan Islam yang dibangun di ruang publik digital dan (2) menganalisis *public counter public* di ruang digital dalam memperebutkan suara umat. Signifikansi yang diharapkan penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan tentang etnografi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan "netnografi" yang diperkenalkan oleh Robet Kozinets, yaitu penelitian yang menekankan aspek penelitian lapangan dengan menempatkan media sosial sebagai arena sirkulasi wacana yang berlangsung terus-menerus dalam interaksi sosial yang intens dari berbagai individu dan kelompok. Dasar utama metode penelitian netnografi adalah etnografi karena etnografi berupaya mengungkap "makna" dalam setiap komunitas atau kelompok budaya (Geertz, 1973). Netnografi pada prinsipnya juga akan berupaya mengungkap "makna" dalam setiap kelompok budaya atau komunitas (Kozinets, 2010). Basis analisis data netnografi sangat bergantung pada data besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) gerakan Islam di ruang publik sudah dimulai sejak era prakemerdekaan hingga era demokrasi saat ini. Berbagai macam dimanika yang terjadi pada gerakan Islam di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan gerakan Islam menjadi bagian penting dalam pembentukan konstitusi negara maupun kehidupan sosial budaya di Indonesia. Masuknya era ruang publik digital, negara kemudian bertransformasi menjadi **negara demokrasi** (*the democratisation state*), sehingga arus-arus wacana tentang Islam di ruang publik digital menjadi liar dan tidak terkendali berkontribusi dalam wacana-wacana politik di Indonesia.; (2) narasi tentang keumatan dalam pilpres tahun 2019 menimbulkan *public counter public* dalam ruang publik digital, khususnya di media sosial. Narasi siapa yang lebih Islami menjadi ramai diperbincangkan yang dapat membentuk opini dan perilaku politik yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan polarisasi yang tajam antara kedua kubu pendukung pro-Jokowi dan pro- Prabowo pada tahun 2019.

Kata kunci: netnografi, politik identitas, pilpres 2019, SNA, gerakan sosial, umat



ABSTRACT

AHMAD ISMAIL. *The Narrative of Fighting for The Ummah Discourse Construction Regarding 'Islamic' Identity Politics in The 2019 Presidential Election on Media Social in Indonesia* (Supervised by Pawennari Hijang, Alimuddin Unde, and Tasrifin Tahara).

This research describes the elaboration of the relationship between various narrative practices that present nuances of fighting over the ummah through the mediation of digital public spaces and looks at the implication in the logic of 'presenting' identities for two groups supporting the 2019 presidential candidate in Indonesian. The aims of this research are (1) to describe the history and narrative of the Islamic movement built in the digital public space, and (2) to analyze the public counter public in the digital space in fighting over the voices of the ummah. This research is significant because it is expected to contribute to digital ethnography. This study used the 'Netnographic' approach introduced by Robert Kozinets. The research emphasized the field research aspect by placing social media as an arena for the continuous circulation of discourse in intense social interactions of various individuals and groups. The primary basis of Netnographic research methods was ethnography. Where ethnography seeks to reveal the 'meaning' of each community or cultural group (Geertz, 1973). Netnography, in principle, will also try to reveal the 'meaning' of each cultural group or community (Kozinets, 2010). Netnographic data analysis base was highly dependent on big data. The study results show that (1) the Islamic movement in the public space started from the pre-independence era to the current democratic era. Various kinds of dynamics that have occurred in Islamic movement in Indonesia from time to time show that the Islamic movement has become an essential part of the formation of the state constitution and socio-cultural life in Indonesia. Entering the era of the digital public sphere, the state then transformed into a democracy state, where discourses about Islam in the digital public sphere become wild and uncontrolled, contributing to political discourses in Indonesia; (2) the narrative about publicity in the 2019 presidential election creates a public counter public in digital public spaces, especially on social media. The narrative of who is more Islamic has become a hot topic of discussion which can shape different opinions and political behavior. This led to a sharp polarization between the pro-Jokowi and Pro-Prabowo supporters in 2019.

Keywords: netnography, identity politics, 2019 presidential election, SNA, social movement, ummat



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

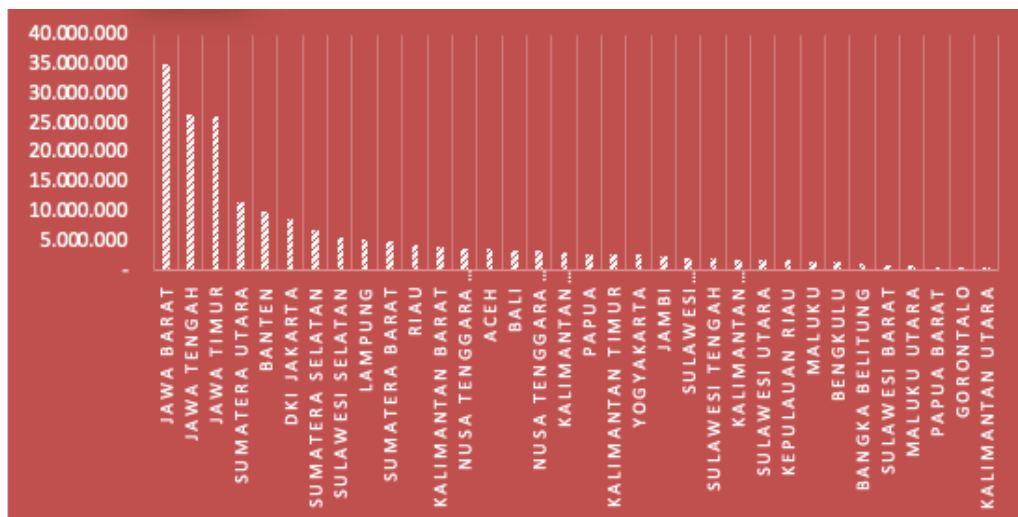
1. Penetrasi dan Profil Pengguna Internet di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangatlah massif dan telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak munculnya Facebook di tahun 2005. Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2019-2020 menunjukkan angka yang signifikan penggunaannya, yaitu sebesar 196.714.070 Jiwa naik sebesar 8,9% atau sebesar 25.537.353 jiwa dari tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet sekitar 73,7% dari jumlah penduduk di Indonesia yakni sekitar 266.911.900 jiwa Tahun 2019. Pertambahan penggunaan internet sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pengguna internet 10 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2008 yang hanya mencapai 25 juta penduduk saja. Angka di atas bisa jauh lebih besar jika dibandingkan dengan data penggunaan gawai berbasis internet di Indonesia. Data tahun 2014 saja sudah menunjukkan 281 juta penduduk Indonesia yang mengakses internet melalui gawai. Jumlah tersebut sudah melebihi jumlah populasi jiwa di Indonesia, yakni 266 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dan penetrasi internet melalui social media sangat massif.

Penggunaan internet di seluruh Indonesia jumlahnya masih sangat bervariasi. Hal ini sangat bergantung pada infrastruktur dasar seperti

kondisi jalan dan jembatan, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi yang memadai. Tantangan nyata untuk meningkatkan penetrasi internet di daerah bukan perkara mudah. Letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, daerah terpencil yang sulit dicapai menjadi tantangan untuk meningkatkan penetrasi penggunaan internet. Lokasinya yang pegunungan, laut, pulau-pulau menjadi tantangan berat buat untuk meningkatkan infrastruktur internet di Indonesia. GM Future Network Project Telkomsel Ronald Limoa mengakui kendala geografis memang masih menjadi kendala hingga saat ini. Operator perlu membuat inovasi agar servis yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah bisa tetap tersampaikan dan tidak terhalangi oleh infrastruktur pendukung khususnya listrik.

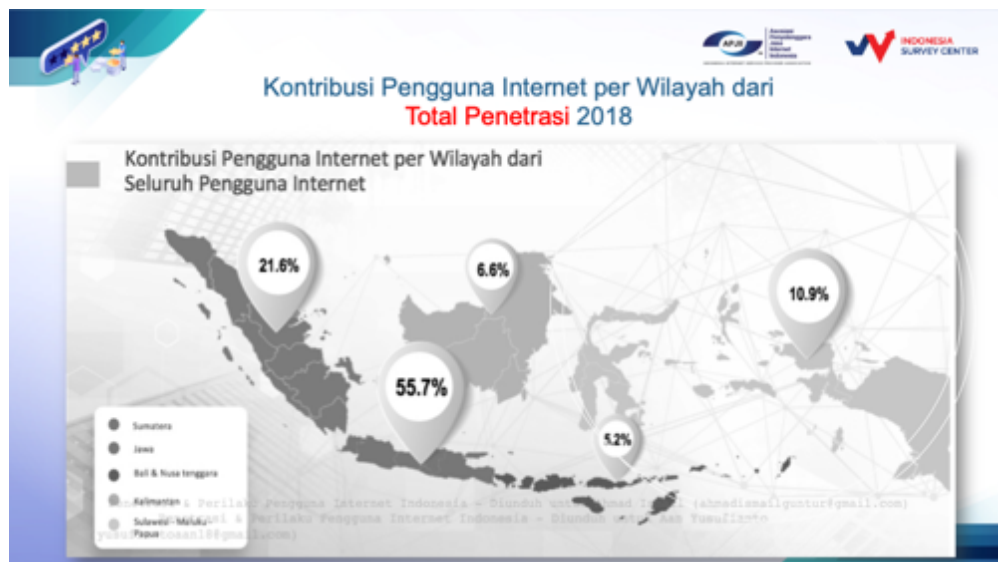
Gambar 1 Pengguna Internet Berdasarkan Provinsi di Indonesia



Sumber: APJII 2020

Berkaitan dengan topik penelitian ini, profil pengguna internet di Indonesia didominasi Pulau Jawa. Dimana Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi Provinsi yang tertinggi pengguna internetnya. Hal ini menunjukkan pergerakan dan distribusi wacana masih sepenuhnya dapat dimassifkan di daerah-daerah yang padat penduduk seperti di 3 wilayah Jawa yang tertinggi penetrasinya, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun resonansi wacananya melingkupi wilayah nasional, dan seringkali internasional. Misalnya #JokowiPresident, dan #Jokowi2periode di twitter masuk dalam trending global.

Gambar 2. Total Penetrasi Pengguna Internet per Wilayah di Indonesia



Sumber: Survei APJII Tahun 2019-2020

Revolusi internet internet telah merubah banyak perilaku manusia dalam berinteraksi. Konsekuensi penetrasi internet di Indonesia yang begitu massif telah dimanfaatkan ke segala bidang kehidupan, salahsatu diantaranya adalah pada bidang ekonomi. Sebelum era revolusi internet

5.0, praktik-praktik ekonomi baru bisa terbentuk setelah adanya pertemuan secara tatap muka untuk meyakinkan penjual dan pembeli dalam setiap jenis transaksi. Dimana kehadiran fisik, tatap muka, dan saling berjabat tangan memberikan konfirmasi bahwa *trust* kemudian bisa terbentuk dan tumbuh sebagai landasan untuk bisnis. Namun, dalam konteks kekinian, pertemuan fisik, tatapan mata, hingga berjabat-tangan tidak lagi menjadi syarat untuk membangun sebuah kepercayaan "*trust*". Hal tersebut sudah diprediksi oleh Fukuyama melalui buku *Trust*, bahwa perkembangan revolusi teknologi informasi ini akan menandai berakhirnya hiraki dalam segala bentuknya –politik, ekonomi dan sosial (Fukuyama, 2002;33). Penetrasi internet telah membuka ruang-ruang ekonomi baru yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Menurut *Analytic Data Advertising (ADA)*, aktivitas belanja online naik 400% sejak Maret 2020 akibat pandemi Covid-19. Bank Indonesia (BI) mencatat, transaksi pembelian lewat *e-commerce* pada bulan Maret 2020 mencapai 98,3 juta transaksi. Angka itu meningkat 18,1% dibanding dengan Februari 2020. Selain itu, total nilai transaksi *e-commerce* meningkat 9,9% menjadi Rp 20,7 triliun dari bulan Februari 2020. Pada era digital, masyarakat dengan mudah melakukan transaksi virtual dalam berbelanja, contohnya *cash on delivery (COD)*, *e-wallet*, rekening bersama, transfer, dan kartu kredit. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan perilaku yang mendasar terkait dengan perilaku ekonomi.

Tingginya angka penetrasi internet di Indonesia telah membuka ruang yang lebar ruang-ruang interaksi baru, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Namun begitu, hal ini juga memberikan ruang yang luas atas dampak kejahatan di ruang internet atau disebut oleh Piliang ialah *Cybercrime*. Menurut Fuady (2005) mengatakan bahwa perilaku kejahatan konvensional juga telah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, seperti internet. Dalam uraian kasus dalam penelitian Fuady menemukan kejahatan-kejahatan yang terjadi di tahun 2005 pada umumnya berupa kejahatan finansial atau keuangan dengan metode *hacking* kartu kredit. Hal ini bagi para *hacker* bukan suatu kejahatan, bagi mereka ini ada bermain, tetapi tentunya merugikan secara finansial banya orang. Perkembangan kejahatan internet ditahun 2007 dan seterusnya sudah masuk pada ranah kebocoran data privasi dan bahkan pelecehan seksual. Dilansir oleh Kompas.com kejahatan di internet (*cybercrime*), meningkat 4 kali lipat pada masa pandemic di tahun 2020¹. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2020, terdapat hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia, naik lebih dari empat kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat di kisaran 39 juta. Angka terbanyak dicatat pada Agustus 2020, di mana BSSN mencatat jumlah serangan siber di kisaran 63 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan Agustus 2019 yang hanya di kisaran 5 juta. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut menunjukkan

¹ <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi> di akses pada tanggal 29 Maret 2021

bahwa angka penggunaan internet di Indonesia selama pandemi memang meningkat hingga kisaran 40 persen. Peningkatan itu tak lain disebabkan oleh kebijakan *social distancing* yang membuat warga bekerja, belajar, dan melakukan berbagai aktivitas lain dari rumah lewat sambungan internet.

Gambar 3. Data Jumlah Serangan Siber Januari - Agustus 2019/2020



Sumber: Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional

Pertumbuhan yang pesat pada penggunaan *smartphone* atau perangkat teknologi informasi disebabkan antara lain adalah konteks berkembangnya investasi startup di Indonesia sebagai bentuk sarana marketplace di Indonesia. (Lim, 2002). Dengan demikian, Perkembangan teknologi informasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan pertumbuhan industri teknologi informasi di dunia seperti Amerika, Jepang, Eropa, Cina, dan India. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 dunia, merupakan salah satu target market sasaran impor berbagai komoditas teknologi informasi maupun komoditas barang dari seluruh penjuru dunia. Indonesia sebagai

Negara dengan potensi konsumsi yang besar, membuat Negara-negara yang sudah lebih dulu mengembangkan startup menjadikan Indonesia sebagai sasaran pasar yang besar. Pertumbuhan yang tinggi dari teknologi internet dan media lainnya memunculkan pertanyaan bagi penulis, apakah yang menyebabkan fenomena demikian selain kemunculan ekonomi pasar? Terkait dalam isu sosial budaya, adakah konteks-konteks yang mengkondisikan pertumbuhannya? Dalam konteks latar belakang sosial apakah pertumbuhan itu terjadi? Implikasi apa yang terjadi terhadap relasi sosial-kultural dari percepatan komunikasi ini di Indonesia?.

2. Pilpres 2019: Arena Kontestasi pada Media Baru

Selama Kampanye Kepresidenan AS 2012, calon petahana, Barack Obama berpartisipasi dalam sesi tanya jawab "*Ask Me Anything*" (AMA) di situs berita sosial, www.reddit.com. Meskipun dia hanya menjawab sepuluh pertanyaan, interaksi Presiden Obama dengan warga negaranya melalui reddit mewakili titik penting untuk "halaman depan Internet" yang disebut sendiri. Didirikan pada tahun 2005 oleh Alexis Ohanian dan Steve Huffman, reddit telah berkembang dari perusahaan rintisan teknologi kecil menjadi salah satu situs terbesar di AS. Pada dasarnya, reddit mengumpulkan konten yang dikirimkan oleh pengguna (baik sebagai tautan eksternal ke gambar, video atau artikel, atau sebagai posting mandiri dan memberi peringkat berdasarkan cara pengguna memilih (suara positif atau negatif). Demikian juga, pengguna

reddit (redditor) juga dapat memberikan suara pada komentar di bawah setiap tautan atau posting mandiri.

Melalui aplikasi reddit, ribuan redditor mengungkapkan pendapat dan langsung mengajukan pertanyaan kepada Presiden yang sedang menjabat. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi situs redditor bagi warga untuk berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah mereka melalui situs sangat terbuka luas dan langsung tanpa perantara. Hal ini dipahami sebagai bentuk budaya diskursif di mana "publik" mengkomunikasikan pendapat mereka kepada negara secara langsung. Ahli teori sosial Jerman Jürgen Habermas sebelumnya memperkenalkan "ruang publik" sebagai area analisis pada akhir 1960-an. Seiring perkembangan Internet dan akses ke Web menjadi lebih umum sepanjang tahun 1990-an, berbagai ahli teori mulai mempertanyakan kemampuan teknologi baru ini untuk menyediakan bentuk baru "ruang publik" melalui jaringan komunikasi yang canggih. Sesi AMA Presiden Obama tampaknya memberikan jawaban atas pertanyaan awal ini; ya, Internet dapat digunakan oleh publik untuk berkomunikasi dengan negara di tingkat tertinggi. Selain itu, Parlemen Amerika membuat Keputusan Komisi Komunikasi (FCC) yang mendukung "netralitas jaringan" sangat dipengaruhi, sebagian, oleh komunitas reddit yang mengedarkan petisi dan mendorong satu sama lain untuk menghubungi FCC dan anggota kongres mereka tentang masalah yang berpengaruh tersebut. Menyusul keputusan FCC, Presiden Obama merilis catatan resmi yang ditulis tangan kepada redditor, berterima kasih kepada

mereka atas partisipasi mereka yang berkelanjutan dalam proses demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran aplikasi di internet memberikan pengaruh "*influence*" yang kuat dan secara langsung dapat menggerakkan massa untuk kepentingan dan tujuan tertentu.

Pada beberapa hasil kajian lainnya, pada era akhir tahun 90an, berakhirnya kekuasaan rezim orde baru berhubungan dengan pertumbuhan internet sebagai media informasi para aktivis politik. Kemunculan berbagai jaringan politik di era reformasi dan gerakan kemerdekaan informasi oleh kalangan aktivis teknologi informasi melatarbelakangi berkembangnya penggunaan teknologi informasi secara lebih massal di periode 1997-1999. Kemunculan jejaring warnet seperti Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI) untuk internet murah dan pertumbuhan *mailing list* untuk tujuan menjatuhkan rezim orde baru, meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, berperan dalam pertumbuhan dan juga pemerataan atas teknologi informasi (Ismail, 2012). Pasca gerakan politik dari kalangan aktivis politik dan pemerataan teknologi informasi ini terbukalah ruang artikulasi politik dari berbagai kelompok sosial, seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi yang semakin murah.

Penelitian ini menggambarkan kemunculan arena sosial, pertemuan, dan artikulasi kultural yang hadir antara dua pendukung Capres-Cawapres pada tahun 2019 yang merebut wacana keummatan melalui sosial media. Apabila di masa lalu artikulasi pemikiran diproduksi dalam konteks ruang-ruang terbatas, sedikit, tidak merata, maka

kehadiran media atau teknologi informasi memberikan ruang yang lebar dan luas dalam menggiring opini publik, tentang kekuatan umat dalam pemilihan presiden republik Indonesia tahun 2019. Berbagai bentuk individu atau kelompok pendukung Capres-Cawapres mengartikulasikan berbagai pemikiran tentang kedekatannya dengan umat melalui instagram, facebook, youtube, dan twitter, pada saat yang sama pula bisa dibantah atau divonis di media oleh lawan mereka pada media tersebut. Bagaimanakah kita memahami jejaring sosial media terkait dengan artikulasi dan relasi sosial individu-individu yang mengafiliasikan pada kelompok pendukung Capres-Cawapres tertentu dengan membawa atau menggiring opini tentang umat yang berada pada pendukung salah-satu Capres-Cawapres?

Di Indonesia pada masa-masa lampau hingga saat ini, sejarah relasi keberagaman atau ekspresi di kalangan muslim seringkali muncul dalam berbagai macam ketegangan. Sejarah pertentangan antara kelompok muslim di Indonesia disebabkan berbagai macam hal. Diantaranya ialah disebabkan perbedaan ideologi dan bahkan perbedaan praktik-praktik keagamaan dalam kehidupan sosial diruang-ruang publik (Hardianto, 2012). Dalam rangka tahun politik, pemilihan umum digelar pada tahun 2019. pertarungan pilpres kembali diikuti oleh dua kontestan yang sama seperti apa yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Isu yang dikembangkan tahun 2014 lalu untuk menghadang para calon ialah PKI, Komunis, antek asing, penculikan, pemimpin otoriter, dan lain-lainnya.

Jokowi sebelum terpilih sebagai presiden tahun 2014, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau biasa dikenal dengan Ahok. Pergulatan penolakan kelompok islam pada pemilihan gubernur Jakarta tahun 2013 sudah muncul untuk menghadang Ahok maju sebagai orang nomor 2 di Ibu Kota Negara Indonesia. Wacana yang dimunculkan yaitu muslim dan non-muslim. Kelompok-kelompok islam pada saat itu sudah mulai menentang pencalonan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI. Namun pada hasil Pilkada DKI Jakarta berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah, Jokowi-Ahok memenangkan kontestasi pilkada DKI Jakarta.

Setuasi semakin memanas ketika Jokowi mencalonkan diri menjadi calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Posisi Gubernur DKI Jakarta secara otomatis diisi oleh Wakil Gubernur Ahok menjadi gubernur defenitif. Gelombang kelompok islam di DKI Jakarta sudah mulai buka suara. Menyuarakan politik SARA menentang Ahok menjadi gubernur karena agama yang dipeluknya adalah kristen. Secara intensif kelompok islam yang kemudian dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) semakin massif melakukan perlawanan-perlawanan kepada gubernur Ahok, yang pada intinya menuntut ahok untuk mundur dari jabatannya karena berbeda keyakinan. Pergulatan penolakan tersebut terus-menerus terjadi hingga tahun 2018 dimana masa jabatan Ahok berakhir pada tahun tersebut.

Memasuki kembali Pilkada Jakarta tahun 2018, Ahok kembali maju sebagai calon gubernur Jakarta, namun dalam pilkada tersebut ahok

dikalahkan oleh Anies Baswedan yang didukung oleh kelompok muslim yang dimotori oleh FPI untuk memperebutkan Kursi DKI Jakarta periode 2018 – 2023. Hal ini kemudian diperparah ketika, potongan pidato Ahok dikepulauan seribu dipelintir sebagai sebuah penistaan agama. Dalam persidangannya, Ahok dinyatakan bersalah dan melakukan penistaan agama sehingga diganjar 2 tahun penjara. Desakan FPI dan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI dengan berbagai macam organisasi islam lahir dari peristiwa itu seperti Gerakan Gerakan 411, Gerakan 212, dan gerakan lainnya berhasil menggiring opini publik untuk tidak memilih Ahok dan menggiring opini publik agar desakan memenjarakan Ahok segera ditetapkan.

Akibat dari peristiwa penistaan agama yang dalam putusan pengadilan dianggap bersalah, maka kemudian, kelompok bentukan kelompok-kelompok tersebut terus-menerus dipelihara, dirawat, dan dibina dalam rangka untuk merebut kursi nomor 1 di Indonesia. Gerakan-gerakan massif di sosial media tidak kalah riuhnya dalam menggiring opini masyarakat dalam mendukung dan menentang calon presiden tertentu. Peristiwa ini menandai bahwa peran tokoh agama dalam membangun Indonesia sangatlah penting. Sehingga desakan untuk ulama dalam menjadi presiden atau wakil presiden menjadi sangat kuat dalam pertengahan tahun 2018.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan ruang artikulasi baru bagi kelompok-kelompok Islamis untuk menyebarkan pesan-pesan mereka kepada masyarakat luas. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat

Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM-UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSBPS-UMS) menunjukkan bahwa internet dan media sosial telah menjadi medium paling ampuh dalam menyebarkan paham radikal maupun ekstremis. Kecanggihan teknologi tersebut membentuk ruang-ruang baru untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif untuk mengakomodir kekuatan mereka. Penelitian kedua lembaga ini pada intinya menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, sebagian besar situs organisasi Islam yang populer di kalangan pengguna internet adalah situs organisasi Islam non-afiliasi. Era muslim.com paling populer di kalangan warganet, sedangkan NU-Online merupakan situs organisasi Islam arus utama yang paling banyak dikunjungi, dan hidayatullah.com sebagai situs organisasi Islam kontemporer yang paling banyak dikunjungi. *Kedua*, dalam merespon fenomena radikalisme di masyarakat, NU Online dan Suara Muhammadiyah dengan tegas menolak narasi radikalisme, sedangkan situs organisasi Islam kontemporer cenderung diam melihat fenomena radikalisme dan situs organisasi non-afiliasi sangat mendukung dan menyebarkan narasi-narasi radikalisme di tengah masyarakat. *Ketiga*, para pengguna media sosial yang memproduksi dan menyebarkan pesan-pesan radikal maupun ekstremis sebagian besar menggunakan nama samaran atau menggunakan nama kelompok bahkan tidak terdeteksi. *Keempat*, motivasi pengguna media sosial memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pesan-pesan radikal adalah: (1) ingin menjadikan akun

media sosialnya sebagai media untuk mengkritisi pemerintah; (2) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media untuk menghentikan hoax atau berita yang belum jelas kebenarannya; (3) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media dakwah.

Berdasarkan uraian singkat di atas, Penelitian ini menggambarkan kemunculan arena sosial, pertemuan, dan artikulasi kultural yang hadir antara dua kelompok pendukung Capres-Cawapres di Indonesia melalui ruang sosial media dalam memperebutkan suara ummat. Apabila di masa lalu artikulasi pemikiran diproduksi dalam konteks teknologi media yang tidak memiliki interaksi antara individu di media itu sendiri, sekarang pertemuan dari berbagai kelompok hadir dalam arena sosial yang baru yaitu jejaring sosial media, yang di saat yang sama membuka kemungkinan semua orang untuk memanasifasikan identitas keagamaannya dan menkontraskannya satu sama lain (Hardianto, 2012). Berbagai individu dan kelompok mengartikulasikan pemikirannya melalui instagram, facebook, youtube, dan twitter, disaat yang sama bisa dibantah atau divonis oleh kelompok lain di media tersebut. Bagaimanakah kita memahami jejaring sosial media terkait dengan artikulasi kelompok Capres-Cawapres yang mengafiliasikan dirinya dengan ummat?

Munculnya relasi-relasi sosial keagamaan dalam ruang sosial media telah dikemukakan oleh Blackburn (2003) melalui konsep *Cyber-Islamic-Environment*. Ia mendefinisikan konsep tersebut sebagai keragaman pengetahuan di berbagai wilayah ruang siber yang merepresentasikan aneka pandangan hidup yang menjadi titik referensi dari identitas yang

berkaitan dengan Islam (Blackburn, 2008:1). Lingkungan ruang cyber orang islam mencakup unsur-unsur pandangan hidup yang berkembang di kalangan islam yang dipertukarkan dalam arena sosial baru ini. Satu kelemahan dari pendekatan Bunt adalah kurangnya penjelasan kategoris, historis, dan partikularitas dari bagaimana dinamika dalam kelompok islam terhubung erat dengan kondisi sosial kultural yang spesifik yang sebenarnya beragam, dan memiliki akar sejarah keterikatannya dengan transformasi dari media publik yang sebenarnya sangat beragam pula.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengelaborasi relasi antara berbagai praktik narasi yang hadir bernuansa berebut ummat melalui mediasi teknologi di ruang publik digital dan melihat implikasinya dalam logika “menghadirkan” identitas ke-islam-an bagi dua kelompok pendukung calon presiden di Indonesia pada tahun 2019. Melalui paparan tersebut, penelitian ini hendak mengelaborasi politik “menghadirkan” identitas ke-islam-an tersebut dengan hadirnya ragam ruang publik, yang menariknya, selalu terhubung dengan jangkar diskursif lainnya, yaitu dalam berbagai persoalan keagamaan dan politik identitas keagamaan dalam formasi diskursifnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan dua fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah sejarah dan narasi gerakan islam yang dibangun di ruang publik dan ruang publik digital?
2. Bagaimana analisis *public counter public* diruang digital dalam memperebutkan suara ummat?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan sejarah dan narasi Gerakan Islam yang dibangun di ruang publik dan ruang publik digital.
2. Menganalisis *public counter public* di ruang digital dalam memperebutkan suara umat.

Sebagai penelitian netnografi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan awal tentang etnografi digital mengenai persoalan politik identitas di era teknologi informasi. Sekaligus juga memberikan nuansa baru dalam kajian etnografi digital dengan menggunakan unit analisis yang lebih berorientasi pada *content analysis* dan pembingkaiannya. Pendekatan etnografi lebih menekankan pada aspek penelitian lapangan dengan menempatkan arena sosial media sebagai arena sirkulasi wacana yang berlangsung terus menerus dalam interaksi sosial yang intens dari berbagai individu dan kelompok. Penelitian Etnografi dengan metodologi digital etnografi ini diharapkan menjadi penting sebagai langkah awal pengembangan kajian riset media, politik, dan kebudayaan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. *State of Art* Penelitian

Beberapa kajian sosial budaya mengenai hubungan teknologi media, politik, dan kelompok sosial di Indonesia memaparkan bahwa internet telah membuka akses yang cepat dan masif bagi semua individu/kelompok untuk mengimajinasikan identitas, memanifestasikan, dan menkontraskannya dengan berbagai kelompok lainnya (Bräuchler, 2004). Implikasi dari hal tersebut adalah munculnya ruang publik yang menghubungkan antar individu dan kelompok sosial melalui mediasi teknologi informasi, sehingga teknologi tersebut membuka sebuah *informational terrains* dari dinamika identitas dan kekuasaan (Lim, 2012). Hadirnya *citizen journalism* dan penggunaan situs sosial media seperti youtube, Instagram, WhatsApp, facebook, blog, dan twitter untuk menjadi media pertukaran gagasan dan saling kritik antar kelompok keagamaan di Indonesia adalah salah satu contoh dari hadirnya ruang publik tersebut. Dalam analisis ilmu sosial, kemunculan media sosial ini memunculkan banyak tantangan sekaligus potensi dalam memahami konteks masyarakat Indonesia yang multikultur. Berbagai kajian berpendapat bahwa kehadiran wilayah informasional tersebut berimplikasi terhadap perubahan mode partisipasi berbagai anggota kelompok masyarakat sebagai warga negara dalam demokrasi. Setidaknya terdapat dua perspektif yang membahas dampak dari kehadiran mediasi teknologi informasi dalam proses berdemokrasi dan bernegara.

Pertama, hadirnya ruang publik yang dimediasi teknologi merupakan faktor pendukung jejaring informasi untuk hadirnya demokrasi, otonomi, dan penghargaan terhadap perbedaan (Lim, 2012).

Kedua, berseberangan dengan argumen sebelumnya, justru melihat bahwa teknologi menghambat demokrasi, otonomi, dan sikap menghargai perbedaan. Argumentasi utama dari pandangan kedua mengatakan bahwa teknologi, selain memberikan kemerdekaan mengartikulasikan identitas bagi individu, justru memberikan negara/korporasi kontrol atas ruang publik bagi partisipasi politik warga negara, dan dengan demikian lebih leluasa mengontrol warga negara melalui kekuasaannya memunculkan isu publik. Komentar pesimis lainnya terhadap hadirnya ruang publik yang dimediasi teknologi media adalah terbukanya potensi dan eskalasi konflik antar kelompok sebagai akibat mudahnya sirkulasi narasi kebencian dalam relasi antar kelompok (Bräuchler, 2003). Kedua perspektif ini, meskipun penulis tidak menafikan gejala di masyarakat yang menampilkan keduanya, menurut hemat penulis memiliki beberapa persoalan. Persoalan tersebut antara lain adalah kecenderungan untuk melihat teknologi media sosial yang hanya mampu menghasilkan satu model ruang publik dengan hanya menggunakan kriteria dampak teknologi tersebut bagi warga negara dalam konteks politik liberal-demokratik. Kedua melihat teknologi sebagai instrument yang memprakondisikan sebuah relasi sosial yang secara moral benar atau salah.

Terakhir, kedua perspektif tersebut kerap kali terjebak dalam sebuah usaha menawarkan tipologi universal dari relasi sosial yang dimediasi

teknologi, dan terfokus pada dampaknya terhadap praktik politik liberal-demokratik, tanpa membicarakan dinamika bagaimana jatidiri subjek dari berbagai kelompok menghadirkan dirinya dalam bentuk dan makna yang sangat terkait satu sama lain dengan perkembangan penciptaan, penggunaan, dan perubahan teknologi media sosial itu sendiri.

Berbeda dengan perspektif di atas, penelitian ini hendak memaparkan ruang publik yang justru hadir secara majemuk melalui mediasi teknologi media dalam berbagai konteksnya, serta dilanjutkan dengan membicarakan relasinya terhadap proses “menghadirkan” jatidiri di antara kelompok keagamaan Islam di Indonesia dalam konteks pemilihan presiden tahun 2019 di sosial media. Persoalan yang muncul dalam hal ini bukanlah apakah teknologi media berperan sebagai instrumen untuk mendorong dan membangun satu ruang publik tempat beragam kelompok bertemu dan memperoleh otonominya. Akan tetapi, tulisan ini justru hendak melihat bahwa logika teknologi media mengkondisikan dan dikondisikan oleh subjek-subjek yang berada di dalamnya dalam sebuah hubungan relasional (Miller, 2000), dan sebagai akibat subjek-subjek tersebut beragam, terlebih lagi dalam konteks Indonesia yang multikultur, maka ruang public yang hadir dalam proses relasional itu pun tidak tunggal akan tetapi hadir secara majemuk. Penulis sepakat dengan Lim (2012) bahwa perbincangan tentang keragaman dan implikasinya dalam relasi antar kelompok pasca reformasi di Indonesia tak dapat dilepaskan dari percakapan dan perdebatan yang berkembang sejalan dengan kemunculan beragamnya ruang-ruang publik di Indonesia. Implikasi dari perkembangan

hal tersebut adalah hadirnya keragaman relung alam sosial dari berbagai kelompok yang terkait satu sama lain melalui mediasi teknologi.

Beragamnya ruang publik yang dimediasi teknologi tidak lepas dari perkembangan bentuk dan fungsi teknologi jejaring sosial media yang mengkondisikan otonomi individu dan kelompok untuk bukan hanya sekedar menyerap informasi akan tetapi berperan pula dalam memberikan informasi. Dengan demikian, maka selalu ada kemungkinan bertemunya berbagai narasi di jejaring sosial media dari berbagai narasi yang hadir oleh berbagai kelompok. Konsekuensinya, relasi sosial politik antar kelompok yang dimediasi teknologi media menjadi sebuah arena dari politik pengakuan (*politic of recognition*), dimana berbagai pandangan kelompok yang hadir dari beragam ruang publik tersebut dibenturkan satu sama lain (Taylor, 2007). Lebih jauh lagi, Penulis sepakat pula dengan Warner (2004) bahwa dalam keragaman kelompok sosial, sebuah ruang publik adalah sebuah ruang dimana setiap kelompok berelasi dengan yang liyan, dimana melalui perjumpaan tersebut subjek melakukan refleksi atas sirkulasi berbagai narasi yang ia alami dan praktikan sebelumnya. Ruang publik dan perjumpaan berbagai kelompok berlangsung dalam hubungan relasional sekaligus historis. Hal ini bisa dikaitkan lagi dengan istilah Charles Taylor sebagai *politic of recognition*, yaitu bagaimana jatidiri subjek hadir sebagai sebuah proses relasional dengan yang liyan, melalui kondisi, ketika terjadi proses membedakan definisi tata moral mengenai antara satu kelompok dengan yang lainnya (Taylor et al, 2012).

B. Dari “*Physical Technology*” Menuju “*Social Technology*”

Sejak tahun 80-an hingga era *society 4.0* di tahun 2020, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat di segala bidang, seperti teknologi ilmu kedokteran, pertanian, persenjataan, transportasi, dan juga teknologi komunikasi yang akhir-akhir ini banyak digandrungi oleh masyarakat, yaitu teknologi internet. Dalam pembahasan ini, teknologi yang peneliti maksudkan ialah *physical technology* dalam hal ini teknologi komputer yang menjelma menjadi sebuah *social technology* dalam hal ini teknologi internet yang dianggap kemudian menjadi apa yang disebut Bell (2001) sebagai arena sosial.

Berbicara teknologi internet, kita tidak bisa menjelaskan secara terpisah dengan perangkat (*devices*) yang bisa terkoneksi dengan internet, terutama komputer. Namun apakah perangkat tersebut merupakan benda atau fisik teknologi (*physical Technology*) semata, atau perangkat tersebut sudah menjadi bahkan menjelma menjadi perangkat yang dianggap mampu membentuk “*social Technology*”?

Cikal bakal teknologi komputer diciptakan pada tahun 1679, di mana ditemukan pengembangan awal yaitu notasi biner yang menjadi bahasa dasar bagi semua komputer yang ditemukan oleh seorang filsuf yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz. Kemudian Howard Aiken merancang IBM Mark 7 yang tingginya mencapai 2,4 meter dan panjang 15 meter yang kemudian komputer tersebut menjadi cikal bakal komputer mainframe seperti saat ini. Setelah itu baru pada tahun 1951 komputer elektronik pertama berhasil secara komersial di rancang dengan nama

UNIVAC oleh Eckert dan Muchly. Secara *hardware* baru pada tahun 1991, perkembangan komputer dengan kecepatan tinggi mulai dapat diproduksi, seperti superkomputer CM-2—yang diproduksi oleh the *Thinking Machines, Inc.*, yang dapat melakukan 9,03 juta operasi dalam satu detik. Saat ini mega-komputer telah mampu bekerja dalam bermega-mega juta operasi dalam waktu satu detik (Kasemin, 2016;73).

Menurut Indrajit (2001) era komputerasi dimulai sekitar tahun 1960-an ketika *minicomputer* dan *mainframe* diperkenalkan oleh perusahaan IBM ke dunia industri. Kemampuan hitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengelolaan data (*data processing*). Pemakaian komputer dimasa tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dengan perusahaan yang menggunakan komputer, jauh lebih efisien (dari segi waktu dan biaya) dibandingkan dengan berpuluh-puluh SDM untuk pekerjaan serupa. Pada era tersebut perkembangan komputer belum signifikan banyak dikarenakan persaingan dalam memproduksi komputer belum begitu banyak. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur dan pertambangan pada saat itu memiliki komputer untuk membantu kegiatan administrasinya. Keperluan organisasi keuangan perusahaan yang paling banyak digunakan untuk komputer tersebut, dan kemampuan mainframe untuk melakukan perhitungan rumit juga dimanfaatkan perusahaan untuk membantu menyelesaikan problem-problem teknis operasional (Kasemin, 2016).

Pada tahun 1970-an, komputer memasuki masa-masa revolusinya. Penggabungan antara teknologi komputer dengan teknologi informasi dapat meningkatkan performa komputer dalam pemanfaatannya. Awalnya, teknologi PC (*personal Computer*) mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini-komputer. Dengan seperangkat komputer, seorang manager atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer untuk keperluan perusahaan. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi ketika komputer hanya menjadi “milik pribadi”. Setiap individu atau perusahaan dapat memanfaatkan kecanggihan personal komputer seperti untuk mengelola database, spreadsheet, maupun data processing yang tentu lebih maju dibandingkan dengan komputer di era sebelumnya.

Sama halnya teknologi komputer yang berkembang pesat, teknologi komunikasi pun juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Everett M. Rogerds (1986) dalam bukunya *Communication Technology: The New Media in Society*, mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal ada empat era komunikasi, yaitu: era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media komunikasi interaktif. Dalam era terakhir media komunikasi interaktif dikenal dengan media internet melalui media komputer. Lahirnya teknologi komunikasi interaktif dengan berkembang secara evolusi dari media tulis, ditandai dengan terjadinya diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer dan televisi menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut dengan internet. (Rogerds, 1986).

Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, sejak ditemukannya bahasa dasar komputer yang menjadi cikal bakal penemuan komputer pada tahun 1679 sampai pada tahun 1970-an, yang awalnya komputer hanya dianggap sebagai benda fisik semata yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan hanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, yang kemudian secara bersamaan teknologi komunikasi pun juga mengalami perkembangan yang sangat cepat sehingga melahirkan teknologi internet. Sehingga penggabungan antara teknologi komputer dan teknologi informasi memberikan satu bentuk teknologi internet di mana hal tersebut oleh Bell (2001) dianggap sebagai arena sosial.

Jika hubungan antara dua komponen masyarakat berubah, katakanlah antara seorang individu dan individu lain karena pemakaian teknologi komunikasi, maka sudah terjadi konsekuensi sosial. Bisa saja perubahan itu berawal dari sense dia mengenai orang lain. Tetapi, pada saat seorang individu mulai memikirkan sensenya tentang orang lain, menurut Steven G. Jones (1998:2), sesungguhnya dia juga memikirkan sense dia tentang siapa dirinya, siapa dirinya di antara orang-orang lain dan ingin menjadi apa dirinya. Kalau sudah begini, perubahan hubungan sosial tersebut berasal dari konstruksi seorang individu tentang, individu lain. Kenyataan di atas akan menjadi sangat jelas bila dikaitkan dengan pemakaian komputer dalam masyarakat. Seperti telah diketahui komputer memiliki kedudukan sebagai pembentuk media baru. Media baru, yang membutuhkan komputer tersebut, menjadi alat untuk berkomunikasi. Tidak heran bila orang menyebutnya sebagai *Computer-Mediated Communication* (CMC). CMC ini bisa

meningkatkan kemampuan seorang individu dalam mendengar dan melihat. Nah, orang-orang yang memakai CMC inilah kelak yang membentuk *cybersociety*. Tanpa CMC tidak mungkin ada *cybersociety*.

Bila dalam masyarakat biasa setiap individu hidup bersama-sama secara fisik dalam sebuah daerah tertentu, maka setiap individu di dalam *cybersociety* tidak harus hidup dalam sebuah kawasan tertentu. Bisa saja individu yang tergabung di dalamnya tidak pernah bertemu secara fisik dan hidup di daerah yang berbeda-beda. Mereka terhubung karena sama-sama menggunakan *online communication*. Itulah sebabnya konstruksi sosial mereka tentang sebuah realitas tidak dibentuk oleh jaringan para pemakai CMC, melainkan dalam jaringan itu sendiri. Dengan demikian, di luar jaringan CMC, realitas itu tidak pernah terbentuk.

Persoalan yang barangkali muncul adalah, apakah perubahan hubungan sosial karena pemakaian teknologi komunikasi yaitu internet mengarah pada kebaikan? Tidak mudah menjawabnya. Yang jelas, sebuah teknologi komunikasi selalu memiliki efek samping (*side effect*). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Stanford Institute for the Quantitative Study of Society* terhadap 4.000 pengguna internet menyebutkan bahwa internet menyebabkan isolasi sosial (*social isolation*). Makin lama seorang individu menggunakan internet, makin berkurang kontakannya dengan lingkungan sosial.

Menurut Kasemin (2016) Internet adalah bentuk konvergensi dari beberapa teknologi penting terdahulu seperti komputer, televisi, radio dan telepon. Setelah penemuan komputer yang terus berkembang sampai pada

tahun 1990-an sehingga melahirkan teknologi internet. Perkembangan internet menurut beberapa ahli dianggap sebagai sesuatu yang tidak terduga. Internet begitu memukau dan begitu cepat berkembang dengan varian program aplikasi dan software yang menjadikan bumi dalam cengkraman internet (Ismail, 2010;75). Internet telah berkembang menjadi sebuah teknologi yang tidak saja mampu menciptakan realitas dunia baru dalam realitas kehidupan manusia, yaitu sebuah realitas materialistis yang tercipta dalam dunia maya. Realitas ini bukan mistik, bukan khayalan, namun benar-benar realistis (Kasemin, 2016). Dengan adanya internet, kemampuan penciptaan ruang-ruang maya (*bandwith*) yang amat cepat seperti saat ini, cerita ‘ruang-waktu’ seperti dalam film-film fiktif akan benar-benar menjadi kenyataan.

Menurut Nugroho (2011) teknologi yang dapat menembus “ruang dan waktu” itu, bukan sebuah omong kosong, karena secara empiris, mistis telah ribuan tahun lalu dapat mempraktikkannya, sebagaimana makhluk jin mempratikkannya. Maka dengan penuh keyakinan, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa para ilmuwan telah dapat memecahkan misteri “ruang dan waktu” dalam melihat fenomena teknologi internet ini. Dijelaskan oleh Bell (2001), sekarang ini yang terpenting dan paling luas adalah internet, yang menghubungkan komputer-komputer pribadi yang paling sederhana hingga komputer-komputer yang paling canggih tersebut terhubung satu sama lain dengan teknologi internet. Layanan yang diberikan oleh internet mencakup *email*, *netnews*, *Telnet*, *file transfer protokol (FTP)*, dan *World wide Wet (www)*. Diantaranya yang paling banyak di gunakan ialah *email*

dan *www*. Pengguna internet dapat masuk memasuki situs yang diinginkannya dan memilih hubungan dengan suatu topik yang spesifik, sehingga dapat mengakses muatannya seketika. Jika kita mengakses situs seednet di <http://www.seed.net.tw>, kita akan melihat berbagai teks dan grafik. Ketika kursornya di pindahkan ke “audio and video center” hiperlink dan mengkliknya, maka akan dihubungkan dengan situs lainnya di mana ada pusat film, menara jaringan, MTV, dan masih banyak lagi. Lewat hubungan-hubungan seperti itu, kita dapat terhubung dengan tempat di mana pun di dunia ini melalui internet. Kekuatan internet, bukan hanya sekadar pada kecanggihan *hardware* tetapi juga pada kerumitan *software*-nya. Aplikasi *software* komunikasi dan kolaborasi koneksi digunakan untuk mendukung komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi jaringan yang ada dalam *cybercommunication*.

C. Gerakan Sosial

Para sarjana telah mengajukan definisi yang berbeda tentang gerakan sosial. Perbedaan definisi tersebut berkaitan erat dengan perbedaan pendekatan yang digunakan ketika menganalisis fenomena gerakan sosial. Para sarjana yang mewakili pendekatan struktural (*structural approach*) lebih menekankan dimensi politik dan organisasi, sementara para sarjana yang mewakili pendekatan kultural (*cultural approach*) lebih menekankan dimensi sejarah dan budaya.

John McCarthy dan Mayer Zald, teoretikus gerakan sosial yang mewakili pendekatan struktural mendefinisikan gerakan sosial sebagai "seperangkat pendapat dan keyakinan dalam suatu populasi yang

mewakili preferensi untuk mengubah beberapa elemen struktur sosial dan/atau distribusi ganjaran dalam suatu masyarakat” (McCarthy, & Zald, 1977) . Definisi ini memberikan penekanan pada faktor organisasi. Penekanan pada aspek organisasi ini tercermin dalam gagasan McCarthy dan Zald tentang "*social movements organizations*" (SMO), "*social movement industries*" (SMI) dan "*social movement sectors*" (SMS).

Charles Tilly, teoretikus lain yang mewakili pendekatan struktural, mendefinisikan gerakan sosial sebagai "rangkaian interaksi berkelanjutan antara pemegang kekuasaan dan orang-orang yang mengajukan klaim dan berbicara atas nama konstituen yang tidak memiliki perwakilan formal. Orang-orang tersebut mengajukan tuntutan terbuka untuk perubahan distribusi atau pelaksanaan kekuasaan melalui demonstrasi dukungan publik” (Tilly, 1984). Definisi ini memberikan penekanan pada aspek politik. Dalam definisi ini, gerakan sosial tidak digambarkan sebagai sebuah kelompok, kuasi-kelompok atau gabungan kelompok, melainkan “suatu interaksi sosial yang kompleks" (*a complex form of social interactions*)" (Tilly, 1994).

Di lain pihak, para sarjana yang mewakili pendekatan kultural lebih menekankan dimensi sejarah dan budaya dalam mendefinisikan gerakan sosial. Alain Touraine, misalnya, mendefinisikan gerakan sosial sebagai "perilaku kolektif terorganisir dari aktor kelas (*class actor*) yang berjuang melawan musuh kelasnya (*class adversary*) demi kontrol sosial atas historisitas dalam komunitas konkret" (Touraine, 1981:77).

Definisi ini menegaskan bahwa gerakan sosial pada dasarnya merupakan manifestasi konflik sosial berbasis kelas seputar kontrol sosial atas pola-pola budaya utama dalam konteks sejarah yang spesifik.

Senada dengan Touraine, Alberto Melucci mengidentifikasi gerakan sosial sebagai manifestasi konflik dalam konteks kehidupan sosial dan personal yang tidak harus bersinggungan langsung dengan organisasi-organisasi politik sebagaimana dibayangkan oleh pendekatan struktural. Namun, tidak seperti Touraine yang memusatkan perhatiannya pada isu konflik kelas dalam konteks masyarakat post-industri, Melucci lebih memusatkan perhatiannya pada isu konflik sosial pada wilayah kultural dan simbolis. Melucci (1989:29) mengusulkan definisi gerakan sosial sebagai kelas khusus fenomena kolektif yang mengandung tiga dimensi, yakni: (1) bentuk aksi kolektif yang melibatkan solidaritas, yakni pengakuan bersama aktor-aktor bahwa mereka merupakan bagian dari unit sosial tunggal; (2) terlibat dalam konflik dengan musuh yang melontarkan klaim atas barang dan nilai yang sama; (3) melanggar batas-batas kesesuaian suatu sistem dan, dengan demikian, mendorong sistem di luar rentang variasi-variasi yang dapat ditoleransi tanpa mengubah strukturnya. Menurut Melucci, gerakan sosial pada dasarnya berjaln berkelindan dengan tenunan kehidupan sehari-hari (*everyday life*) dan pengalaman individual (*individual experience*). Gerakan sosial tidak harus bersentuhan

langsung dengan konflik politik yang nyata (*visible political conflicts*). Aksi publik hanyalah salah satu bagian dari pengalaman gerakan sosial.

Dalam perkembangannya, pada penulis belakangan berupaya memformulasikan definisi yang dianggap dapat mencakup pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Ini dapat dilihat antara lain dalam definisi yang diajukan oleh David Snow, Sarah Soule dan Kriesi. Menurut mereka, upaya untuk memformulasikan definisi gerakan sosial bukan perkara mudah, karena para penulis telah menawarkan berbagai definisi yang berbeda sesuai dengan perspektif teoretis masing-masing. Meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam definisi-definisi mereka. Snow dkk (2004:6) berpendapat bahwa definisi-definisi tersebut sebagian besar didasarkan pada lima poros konseptual (*conceptual axes*) berikut: (1) aksi kolektif atau bersama (*collective or joint action*); (2) klaim atau tujuan yang berorientasi pada perubahan (*change-oriented goals or claims*); (3) beberapa aksi kolektif atau bukan ekstra kelembagaan (*some extra- or non-institutional collective action*); (4) beberapa derajat organisasi (*some degree of organization*); dan (5) beberapa derajat kesinambungan temporal (*some degree of temporal continuity*).

Berdasarkan kelima poros konseptual tersebut, Snow dkk (2004) mendefinisikan gerakan sosial sebagai "kolektivitas yang bertindak dengan beberapa derajat organisasi dan kesinambungan di luar saluran kelembagaan atau organisasi untuk tujuan menantang atau mempertahankan otoritas yang ada (*extant authority*), baik berbasis

budaya atau kelembagaan, dalam kelompok, organisasi, masyarakat, budaya, atau tatanan dunia di mana mereka menjadi bagiannya."(Snow, dkk, 2004). Menurut Snow dkk definisi ini lebih memadai jika dibandingkan dengan definisi-definisi lain--khususnya definisi yang selalu menghubungkan gerakan sosial dengan negara atau pemerintahan-karena definisi ini lebih luas dan inklusif sehingga dapat mencakup sejumlah fenomena aksi kolektif yang dapat diperhitungkan atau dianalisis sebagai gerakan sosial. Sejauh suatu aksi kolektif dapat menimbulkan tantangan baik langsung maupun tidak langsung terhadap otoritas kelembagaan, organisasi, atau budaya atau sistem otoritas secara umum, maka aksi kolektif tersebut dapat disebut sebagai gerakan sosial (Snow, 2004). Dengan demikian, konsep gerakan sosial dapat diaplikasikan bukan hanya pada fenomena aksi kolektif yang ditujukan kepada negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aksi kolektif dalam skala lokal, nasional maupun global, termasuk apa yang disebut sebagai "gerakan sosial baru" (*new social movements*) yang berpusat pada isu-isu seputar makna, simbol dan identitas.

Dalam pembahasan diatas telah dikemukakan bahwa studi gerakan sosial diwakili oleh dua pendekatan yang berbeda yakni pendekatan struktural dan pendekatan kultural menurut Roggeband Dan Klandermans, pendekatan struktural lebih menekankan pentingnya struktur mobilisasi distribusi sumber daya material serta lembaga dan organisasi yang mengatur distribusi tersebut dan peluang politik bagi kemunculan gerakan sosial sementara pendekatan kultural lebih

berkonsentrasi pada pertanyaan tentang bagaimana individu dan kelompok merasakan, memahami dan menafsirkan kondisi-kondisi material dan berfokus pada akar-akar kognitif, afektif dan edisional dalam aksi kolektif.

Pada awal pertumbuhannya studi tentang gerakan sosial didominasi oleh teori perilaku kolektif (*Collective behaviour theory*) yang didasarkan pada mazhab struktural fungsional menurut Goodwin dan Jasper. Penelitian tentang gerakan sosial hingga tahun 1960-an didominasi oleh teori perilaku kerumunan (*theories of crowd behaviour*). Teori ini menggabungkan ketenangan makro struktural dengan pandangan peyoratif terhadap partisipan gerakan sosial. Kerumunan di amuskan menciptakan emosi perasaan "Primitif" yang mereduksi kapasitas berpikir individu.

Teori perilaku kolektif pada dasarnya memberikan penjelasan yang cukup menarik seputar kontak sosial yang melatarbelakangi kemunculan aksi kolektif. Oleh karena demikian, peran utama konteks sosial dalam tradisi ini adalah untuk menjelaskan situasi abnormal seperti apa yang memungkinkan timbulnya kegiatan kolektif ini. Neil Smelser, misalnya menekankan "ketegangan struktural" (*structure strain*) sebagai syarat yang perlu untuk aksi kolektif. Istilah "ketenangan" (*strain*) didefinisikan oleh Smelser sebagai gangguan atau kerusakan hubungan sosial yang mengakibatkan komponen-komponen tindakan (*Components of action*) berfungsi secara tidak memadai. Menurut Smelser, ketenangan dapat terjadi pada segala jenis komponen

tindakan nilai (*values*), Norma (*norms*), mobilisasi motivasi untuk tindakan terorganisir (*mobilization of motivation for organized action*) dan fasilitas situasional (*facilities situational*).

Ketegangan yang terjadi pada setiap jenis komponen tindakan ini pada gilirannya menciptakan jenis-jenis ketenangan struktural yakni ketenangan nilai (*value strain*) ketegangan normatif (*normative strain*), ketegangan pada mobilisasi (*strain on mobilization*) dan ketegangan pada fasilitas (*strain on facilities*). Ketegangan nilai berkaitan dengan masalah komitmen; ketenangan normatif berkaitan dengan integrasi interaksi manusia; ketegangan pada mobilisasi menyangkut keseimbangan antara aktivitas termotivasi dan imbalannya; ketegangan pada fasilitas menyangkut kecukupan pengetahuan dan keterampilan. Jenis-jenis ketegangan struktural ini membentuk kelas penentu (*class of determinants*) yang pada gilirannya menghasilkan kelas episode kolektif (*class of collective episodes*) dalam pandangan Smelser setiap jenis ketegangan ini dapat menjadi penentu (*determinant*) bagi segala jenis perilaku kolektif dengan demikian setiap episode perilaku kolektif dan upaya perubahan selalu dilatarbelakangi oleh atau merupakan hasil dari ketegangan struktural.

Pada tahun 1970-an teori perilaku kolektif dianggap tidak lagi memadai untuk menjelaskan fenomena gerakan sosial kebanyakan peneliti gerakan sosial pada era ini lebih menekankan aspek organisasi dan sumber daya dalam dinamika gerakan sosial pendekatan ini dikenal sebagai teori mobilisasi sumber daya" (*resource mobilization theory*)

yang dikembangkan oleh John McCarthy dan Mayer zald. Menurut teori ini aktor-aktor gerakan sosial merupakan individu rasional yang melakukan mobilisasi massa berdasarkan pilihan rasional (*rational choice*) mobilisasi aktif kolektif didasarkan pada kalkulasi biaya dan manfaat yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya terutama sumber daya organisasi dan kelembagaan sumber daya ini dimanfaatkan sesuai pertimbangan rasional biaya dan manfaat.

Dalam perkembangannya muncul teori proses politik (*political process theory*) sebagai respon terhadap teori mobilisasi sumber daya yang terlalu menekankan aspek organisasi menurut teori ini gerakan sosial tidak beroperasi dalam ruangan kosong melainkan menjadi bagian dari konteks sosial yang lebih luas yang ditandai oleh konfigurasi peluang dan kendala yang selalu berubah dan cair. Pendekatan ini direpresentasikan oleh Charles Tilly yang memperkenalkan konsep "Politik perseteruan" (*contentious politics*) untuk menggambarkan karakteristik gerakan sosial sebagai pertunjukan politik (*political performance*) yang bersifat dinamis dan interaktif. Tilly, politik perseteruan merupakan interaksi episodik, publik dan kolektif antara pembuat klaim (*makers of claims*) dan objek klaim, biasanya pemerintah, dan klaim tersebut mempengaruhi kepentingan setidaknya salah satu penentu klaim. Dalam arena politik perseteruan tersebut gerakan sosial pada umumnya mengembangkan sejumlah taktik dan strategi yang beragam untuk mempengaruhi para pengikut potensial. Tilly menyebut taktik dan strategi yang beragam ini dengan istilah

reportoar perseteruan (*repertoires of contention*). Menurut Tilly, pemilihan bentuk-bentuk reportual perseteruan bergantung pada jumlah faktor, terutama struktur sistem politik, tingkat represi, dan tradisi budaya.

Teori-teori di atas mewakili pendekatan struktural dalam studi gerakan sosial. dalam perkembangannya, jumlah peneliti gerakan sosial lebih memfokuskan pada faktor-faktor kultural seperti identitas makna dan ideologi. salah satu pemikir yang mengusung pendekatan kultural adalah Alberto melucci. Menurut Melucci, gerakan sosial beroperasi terutama sebagai "Tanda" (*sign*) dan simbol (*symbol*) mereka tidak disibukkan oleh sumber daya material sebagaimana dibayangkan oleh teori mobilisasi sumber daya. Meskipun demikian tantangan simbolis gerakan sosial memiliki dampak sistemik, terutama dalam kemampuannya untuk menciptakan kekuatan yang nyata.

Karya melucci mewakili salah satu kecenderungan "Arus Balik budaya" (*cultural tur*) dalam teori-teori gerakan sosial dalam kecenderungan ini tujuan kepentingan bahkan strategi dan kesempatan politik dari suatu gerakan sosial dilihat sebagai sesuatu yang melekat dalam dan didefinisikan oleh makna-makna dan praktik-praktik kultural sejalan dengan train Arus Balik budaya ini, pada tahun 1980-an sejumlah peneliti gerakan sosial Amerika yang bekerja di bawah bendera "konstruksionisme sosial" (*social konstruktionism*) mulai menekankan faktor-faktor edisional dan proses interpretasi dan simbolisasi dalam dinamika gerakan sosial salah satu pendekatan yang

paling populer dalam gelombang baru minat pada isu-isu ideasional dan interpretatif gerakan sosial ini adalah perspektif pembingkai (*framing perspective*). Menurut perspektif ini gerakan sosial tidak pandang hanya sebagai pembawa ide dan makna yang tumbuh secara otomatis dari pengaturan struktur peristiwa tak terduga atau ideologi yang ada sebaliknya aktor-aktor gerakan sosial dipandang sebagai agen penandaan (*signifying agents*) yang terlibat aktif dalam produksi dan pemeliharaan makna bagi konstituen, antagonis, dan penonton.

Oliver dan Johnston menunjukkan bahwa Arus Balik menuju teori pembingkai (*Framing theory*) terjadi karena warisan teori sebelumnya cenderung memandang rendah ideologi dalam studi gerakan sosial di awal 1970-an. Menurut Oliver dan Johnston, teori pembingkai berakar dari studi linguistik tentang interaksi dan merujuk pada cara berbagi asumsi dan makna bersama membentuk interpretasi atas peristiwa sementara ideologi berakar dari studi politik dan menunjuk ke sistem ide-ide yang koheren yang menyediakan teori-teori tentang masyarakat ditambah dengan komitmen nilai dan implikasi normatif untuk mempromosikan atau menolak perubahan sosial dengan demikian mereka berpendapat bahwa ideologi adalah alat konseptual yang lebih besar daripada bingkai ideologi dapat berfungsi sebagai bingkai dan dapat merangkul bingkai mereka menyarankan bahwa perbedaan harus dibuat antara kedua Konsep ini: "bingkai merujuk pada proses sedangkan ideologi merujuk pada isi". Perspektif pembingkai telah melakukan banyak hal untuk membangkitkan minat pada dinamika

kognitif serta menghubungkannya dengan mobilisasi melalui perspektif ini dimensi Gagasan dan ideologi. Gerakan protes kembali menjadi topik penelitian penting dalam gerakan sosial tetapi sejauh ini cenderung diabaikan dalam studi gerakan sosial sebagaimana dikemukakan Buechler "ideologi telah menjadi anak yatim dalam teori gerakan sosial". Dalam pembahasan berikut penulis akan menguraikan perspektif pembingkaiannya secara khusus. Karena perspektif ini merupakan salah satu lensa teoretis utama dalam penelitian ini.

1. Gerakan Sosial *online*: Realitas atau Ilusi Masyarakat?

Penelitian ini berupaya untuk mengangkat konteks narasi berebut ummat dalam media sosial. Narasi yang digalakkan dalam bungkusan Gerakan sosial yang bertujuan untuk menggiring opini publik terhadap pilihan politik yang berbeda dengan basis agama dan ummat. Politik identitas yang mendapatkan ruang dan kecepatan distribusi akibat hadirnya social media memberikan Ideologi dan *value* yang dimilikinya berbeda dengan yang lain, serta memberikan identitasnya sendiri dalam sebuah gerakan online. Komunitas atau kelompok adalah entitas yang jelas namun istilah ini merupakan istilah yang diperdebatkan diberbagai bidang ilmu seperti antropologi, sosiologi, dan komunikasi, namun komunitas atau kelompok dalam masyarakat adalah salah satu titik fokus penyelidikan antropologi. Sebuah komunitas atau kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang mewujudkan sebuah aturan dalam masyarakat tersebut, memiliki kepentingan bersama,

keanggotaan terbatas, ikatan afektif, nilai-nilai bersama, perilaku, dan interaksi berdasarkan kewajiban merupakan elemen-elemen penting dalam melihat masyarakat.

Galston (2000; 196) memulai pembahasan tentang keberadaan komunitas terhadap definisi masyarakat:

A community involves a limited number of people in a somewhat restricted social space or network held together by shared understanding and a sense of obligation. Relationships are close, often intimate, and usually face to face. Individuals are bound together by affective or emotional ties rather than by a perception of individual self-interest. There is a “we-ness” in a community; one is a member.

[Suatu komunitas yang melibatkan sejumlah orang dalam suatu ruang sosial atau jaringan kerja yang terbatas dibangun bersama dengan berbagi pengertian dan rasa berkewajiban. Hubungan-hubungan yang ada erat, intim dan biasanya langsung bertatap muka. Antar individu diikat secara saling mempengaruhi atau emosional ketimbang didasari oleh persepsi tentang minat per individu. Ada “ke-kita-an” dalam suatu komunitas, diri secara tunggal adalah anggota.]

Galston menarik empat fitur dari definisi ini untuk menilai validitas komunitas: keanggotaan terbatas, memiliki norma bersama, adanya ikatan afektif, dan kewajiban bersama. Juga ditambahkan oleh definisi Bender (1982; 8) berikut:

In its deepest sense, a community is a communion... A community is an end in itself: It may offer aid or advantage to

its members, but its value is basically intrinsic to its own existence. It does not exist to serve external or instrumental purpose. (Bender, 1982; 8)

[Dalam merasakan yang mendalam, komunitas adalah tentang berbagi pemikiran dan apa yang dirasakan. Suatu komunitas adalah akhir itu sendiri; yang mungkin menawarkan bantuan atau memberi manfaat bagi anggotanya, yang secara nilai namun intrinsik keberadaannya, dimana keberadaan tersebut tidak untuk melayani tujuan yang eksternal atau secara makna.]

Dalam analisisnya, masyarakat merupakan “persekutuan” yang berfokus pada ikatan afektif antar anggota masyarakat satu dengan yang lain. Melompat ke sebelumnya sebentar untuk pertanyaan dari komunitas online, Baym (1995; 161) mempunyai klaim tersendiri tentang masyarakat atau komunitas yang termediasi oleh komunikasi di komputer yaitu:

“...participants in CMC develop forms of expression which enable them to communicate social information and to create and codify group-specific meanings, socially negotiate group-specific identities, form relationships which span from the playfully antagonistic to the deeply romantic and which move between the network and face-to-face interaction, and create norms which serve to organize interaction and to maintain desirable social climates”. (Byam, 1995; 161)

[“...partisipan CMC membangun bentuk ekspresi yang memungkinkan mereka mengkomunikasikan informasi sosial dan untuk menciptakan dan meng-kodifikasi makna-makna

dalam kelompok yang spesifik, membangun hubungan yang berjarak antara ke-antagonis-an dan romantis yang mendalam dan bergerak di antara interkasi jaringan kerja dan bertatap muka, dan menciptakan norma-norma yang mendukung pengaturan interaksi dan untuk mempertahankan kondisi sosial yang didambakan”.]

Lokasi geografis sering diasumsikan sebagai sesuatu yang melekat dalam mendefinisikan masyarakat. Setiap hari, interaksi tatap muka dipandang perlu untuk mempertahankan kepercayaan antara anggota masyarakat dan jaringan hubungan sosial antar masyarakat, dan juga kewajiban sebagai anggota masyarakat dengan wilayah geografis tersebut.

Dekade terakhir sebelum munculnya internet dan efek globalisasi hari ini, nilai dari hubungan afektif di antara anggota kelompok masyarakat terlihat lebih penting bagi masyarakat dari aktualitas lokasi fisik. Globalisasi dan trans-nasionalisme terus menunjukkan kepada kita bahwa ikatan sosial, tanggung jawab dan kewajiban dapat melintasi batas-batas negara dengan adanya internet (Axel, 2004; Bernal, 2005; Cohen, 1996; Ignacio, 2005). Kemajuan teknologi telah mempengaruhi komunikasi dengan peningkatan eksponensial dalam kualitas, kecepatan, dan kemudahan akses yang dapat digunakan untuk mengikat anggota, menciptakan konvergensi kesempatan dan kebutuhan. (Hine 2000, Howard and Jones 2004, Jones 1995).

Banyak pendapat tentang bagaimana internet menghilangkan batasan ruang dan waktu membuat satu dunia maya yang melampaui

batas-batas fisik (Bromberg, 1996), ia mengusulkan bahwa ini *decoupling* geografi dari peran inti dalam mendefinisikan masyarakat yang telah membuka ruang diskusi bagi kita untuk memikirkan internet sebagai ruang baru bagi masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi metode lapangan antropologi.

Jika internet telah menjadi ruang baru bagi masyarakat, maka bagaimana hubungan afektif antara anggota kelompok terbentuk, bagaimana tindakan di internet untuk membuat hubungan ini? Sebagai tempat interaktif, internet memfasilitasi pergerakan informasi, uang, dan komoditas yang dibagi, diperdagangkan, dipertukarkan dan dijual, gambar dan simbol yang dipinjam, dikemas ulang dan melintasi batas bangsa dan etnis (Barber, 2001). Ini adalah sebuah ekspresi dunia baru, berbagi kegembiraan dan tragedi pribadi, perdebatan mengenai tujuan hidup, dan ideologi tentang bagaimana dunia harus dibentuk. Ini berdampak bagaimana kita memahami modal sosial dan perannya dalam ikatan sosial di masyarakat, tetapi juga berdampak pada pentingnya lokalitas fisik dalam membangun modal sosial dan ikatan sosial yang menciptakan masyarakat.

D. Masyarakat Digital “Netizen”: Gagasan Konseptual Tentang Ruang Publik

Gagasan tentang ruang publik pertama-tama perlu dilihat dalam konteks yang spesifik masyarakat Barat terutama Eropa. Dalam sejarah peradaban Barat, tempat-tempat seperti Agora di Yunani Kuno, balai kota di

New England, taman kota, bahkan sudut-sudut jalan telah menjadi arena untuk melakukan debat-debat terbuka tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Tempat tersebut menjadi ruang bagi proses hubungan sosial yang berjalan terus-menerus. Dari banyaknya pertemuan itu, telah memulai sebuah opini publik lambat laun mulai terbentuk, dan menjadi kerangka dalam masyarakat memahami tentang apa itu politik. Mengacu pada argumen Mark Paster (2003), meskipun ruang publik semacam itu tidak pernah benar-benar melibatkan setiap orang, dan karena juga tidak mendeterminasi hasil-hasil keputusan parlemen, tapi ia memberi kontribusi pada pemeliharaan semangat berbeda pendapat (*dissent*) yang biasa ditemukan dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan yang sehat (Paster, 2003).

Ketika tempat-tempat fisik semakin langka, media massa kemudian muncul sebagai ruang publik baru yang bisa menjadi substitusinya. Pada tingkat akademik, gagasan tentang ruang publik yang dibentuk oleh media massa di Eropa pertama kali dikemukakan oleh sosiolog Prancis, Gabriel Tarde. Dalam konsepsi Tarde, eksistensi "publik" hanya mungkin bila ada fungsi dari teks atau bacaan yang dibagi bersama (*shared text*), diterbitkan secara teratur, dan bisa diakses oleh umum. Pemikiran Tarde menghasilkan model ruang publik yang bersifat linier dalam tiga asumsi. *Pertama*, surat kabar diasumsikan merangsang atau menghasilkan perbincangan (*converstation*). *Kedua*, Pada asumsi berikutnya, perbincangan akan membentuk opini; dan *ketiga*, pada tingkat paling akhir opini memicu tindakan (Christopher, 2002). Dari gagasan Tarde tersebut ada empat

komponen yang diasumsikan telah membentuk ruang publik di Eropa: berita media, perbincangan, formasi opini publik, dan Partisipasi. Keempatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dikendalikan.

Selain gagasan ruang publik yang berkembang di Eropa, Gagasan Habermas tentang Ruang Publik, terutama ditekankan pada fungsinya sebagai bagian dari kehidupan sosial, dimana warga negara bisa saling bertukar pendapat yang menyangkut berbagai masalah yang menjadi kepentingan bersama, sehingga opini publik bisa dibentuk. Dalam salah satu esainya, ia memberi Batasan lebih definitif tentang ruang publik yang dimaksudnya:

"Dengan ruang publik maksud kami terutama adalah sebuah domain dari kehidupan sosial dimana hal semacam opini publik yang dapat dibentuk. Akses pada ruang public terbuka bagi seluruh warga negara. Satu bagian dari ruang publik terbentuk dalam setiap perbincangan dimana kepentingan pribadi datang secara bersamaan untuk membentuk sebuah public. Ketika publiknya besar, bentuk komunikasi ini mensyaratkan cara tertentu untuk penyebarluasan dan mempengaruhi; Saat ini koran-koran dan terbitan berkala, radio dan televisi adalah media dari ruang publik. Kita bicara tentang ruang publik politik ketika diskusi publik membahas hal-hal yang berhubungan dengan praktek-praktek negara. (Habermas, 1991:298)."

Dihilami oleh momen historis di Eropa pada abad 17 dan 18, ketika kedai-kedai kopi (cafe) dan salon menjadi pusat perdebatan antar sesama anggota masyarakat, Habermas kemudian menempatkan model historis tersebut menjadi tipe ideal bentuk-bentuk partisipasi dalam ruang publik

yang dianggapnya tengah mengalami kemunduran pada abad ke 20. Ia sepenuhnya merasa yakin bahwa ruang publik adalah satu-satunya ruang yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang mengubah sebuah tempat menjadi ruang publik sama sekali bukanlah bentuk fisiknya, melainkan diskusi dan isu-isu yang didiskusikan dalam ruang tersebut. Dengan demikian, meskipun model-model ruang publik yang dirujuk Habermas di Eropa merupakan konsep spasial dan temporal tapi konsep-konsep "ruang" yang dia ajukan bukan terutama menunjuk pada konteks spasial sebagai tempat (tempat) fisik, melainkan lebih pada kemungkinan debat publik oleh banyak orang. Ruang publik semacam ini muncul ketika orang berkumpul dan secara bersama-sama mengukir isu-isu politik.

Debat publik dalam ruang publik, dianggap Habermas dibangun di atas dasar diskusi-diskusi kritis dan rasional, menepiskan unsur-unsur personal dan emosional, menggunakan bahasa yang tidak emotif, dan semua partisipan berusaha mengalasi pandangan subjektifnya, mengesampingkan status, dan hanya terfokus pada dan berkepentingan dengan upaya mencari kebenaran. Seluruh urusan privat juga tidak bisa dibawa ke dalam diskusi publik, karena ruang publik hanya tersedia bagi perbincangan atau wacana tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama seluruh warga. Seperti Tarde, Habermas memberi tekanan kuat pada peran media massa dalam membentuk ruang publik, sambil membedakan secara ketat antara pers yang menyoroti kontroversi politik dan perkembangan media yang dilihatnya telah melakukan komodifikasi berita. Tumbuhnya komunikasi massa dalam bentuk pers yang independen dianggapnya telah

memicu lahirnya ruang-ruang publik yang bisa melakukan kontrol pada kekuasaan pemerintah. Dalam sejarah, surat kabar pada permulaan abad 17 memang pertama-tama diterbitkan sebagai sebuah organ yang benar-benar kritis dari masyarakat yang menanggapi isu-isu politik. Ketika itulah pers, dalam bahasa Habermas, bisa menjadi pilar keempat demokrasi. (Habermas, 1989).

Akan tetapi ruang publik ideal tadi tidak pernah benar-benar terwujud dalam kenyataan masyarakat saat ini. Proses komersialisasi media massa dan perluasan intervensi negara telah membawa kita pada apa yang oleh Habermas disebut satu bentuk "refeodalisasi" ruang publik. Ruang publik runtuh menjadi hanya sebuah dunia khayalan, tempat citra dan opini dikelola dan mengalami komodifikasi untuk tujuan-tujuan komersial belaka.

Lahirnya Internet sebagai Ruang Publik, telah membuka ruang baru sebagai bentuk kritik dari media massa yang cenderung dikapitalisasi dan dikomodifikasi sesuai kebutuhan yang berkepentingan. Ruang internet telah menjadi arena emansipasi ruang-ruang publik dari zaman Athena Kuno sebagian besar sekarang sudah punah. Meskipun beberapa di antaranya masih ada, tapi tempat-tempat itu saat ini sudah tidak lagi menjadi pusat perdebatan politik bagi warga negara. Debat-debat politik kini banyak yang telah berpindah ke dalam ruang-ruang media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi pada era 80an hingga 1990an. Seperti argumen Habermas di atas, media massa kontemporer bukanlah ruang-ruang publik ideal bagi perdebatan politik yang berkualitas dan rasional. Komodifikasi berita, komersialisasi media, dan kecenderungan media massa untuk

menyeleksi opini hanya dari tokoh-tokoh penting tertentu telah mengakibatkan apa yang disebut Habermas sebagai bentuk refeodalisasi ruang publik.

Sebaliknya, kini ruang-ruang publik kemudian berpindah dari media massa, ke media internet, dimana media ini jauh lebih liar, terbuka, tak terkontrol, bebas dari kepentingan. Bentuk-bentuk komunikasi yang dimediasikan melalui komputer (*computer mediated communication/CMC*) dalam internet dianggap telah meniadakan jarak antara *audience* dengan produsen berita, sehingga sumber-sumber informasi independen, seperti lembaga publikasi pers kecil dan independen di Eropa abad 17, menemukan bentuk barunya dalam aksi-aksi komunikasi yang bebas dalam internet. Kekuatan internet dipercaya terletak pada kesanggupannya untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi. Internet kemudian akan dapat menghidupkan kembali, merevitalisasi ruang publik sehingga opini publik yang melibatkan proses perdebatan luas di antara warga negara dapat terus dipelihara untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Pada level teoritis, posisi internet persis mengisi apa yang oleh teoritis Kiri-Baru German, Hans Magnus Enzensberger, disebut sebagai media emansipatoris. Diilhami oleh karya penyair komunis terkemuka, Bertolt Brecht, tentang teori radio, Enzensberger mengembangkan teori tentang kekuatan media dalam memobilisasi massa. Bagi Enzensberg, istilah "media komunikasi" adalah terminologi yang salah tempat kalau dipakai untuk pajak pada bentuk-bentuk media massa modern, karena media

seperti film dan TV sama sekali tidak memfasilitasi komunikasi melainkan justru mencegahnya karena lelah mereduksi umpan balik ke tingkat yang terendah.

Mengikuti garis pemikiran Brecht, Enzensberger kemudian melontarkan gagasan bahwa media harus dipakai untuk komunikasi dua arah (*two-way communication*). Penggunaan media yang bersifat represif akan digantikan oleh penggunaan yang lebih emansipatoris ketika transmisi yang tidak terpusat pada satu agen tertentu, menyebar pada banyak sumber yang independent (Enzensberger, 1970;173). Berbeda dengan jenis-jenis media massa yang pernah ada sebelumnya seperti radio, TV, film, atau media cetak, internet memang bertolak belakang dengan seluruh karakteristik yang dikategorikan oleh Enzensberger sebagai *repressive media use*. Internet, dalam kalimat lain, dipercaya bisa dipakai mewujudkan potensi media massa sebagai penguat demokratisasi, terutama gagasan yang dikenal luas dengan *cyberdemocracy* (Rheingold, 2002). seorang ilmuwan-ilmuwan politik, Ithiel de Sola Pool, misalnya, bahkan menganggap internet dan bentuk-bentuk media yang mengalami digitalisasi lainnya sebagai "teknologi-teknologi pembebasan" (*technologies of freedom*).

Persoalannya kemudian adalah, kalau setiap orang bebas mengemukakan ide atau opininya, dan menyebarkanluaskannya kepada orang lain di seluruh dunia, bagaimana sebuah diskursus yang rasional dan berkualitas bisa diputuskan. Sejauh ini, hampir tidak ada mekanisme yang jelas tentang mengatur lalu lintas informasi dan gagasan dalam internet, sehingga juga tidak mudah menentukan apakah opini-opini itu kemudian

bisa berkembang menjadi sebuah opini publik yang memiliki kekuatan politik. Jika setiap orang menjadi penentu keputusan atas pikiran-pikirannya sendiri, kapan demokrasi berakhir dan anarki dimulai, paling tidak pada tingkat gagasan, menjadi tidak jelas lagi batasan-batasannya.

Konsep ruang publik digital berguna untuk menganalisis dinamika kontestasi ideologi politik di antara gerakan Islam Indonesia di arena digital yang menjadi fokus penelitian ini. Salah satu kontribusi dari perkembangan teknologi digital adalah kemampuannya menghubungkan dan memfasilitasi umat Islam di seluruh dunia untuk membicarakan wacana politik dan keagamaan di dunia maya. Perkembangan ini turut mendefinisikan ulang konsep "*ummah*" (umat) yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Konsep ummah telah mengilhami imajinasi Muslim, khususnya kaum intelektual Muslim, sejak periode awal Islam. Terminologi "*ummah*" muncul lebih dari enam puluh kali dalam al-Qur'an dan memiliki beragam makna mulai dari pengikut nabi, rencana keselamatan ilahi, sebuah kelompok keagamaan, kelompok kecil dalam komunitas kaum beriman yang lebih besar, orang sesat dan makhluk hidup (Denny, 1975; Oda, 1984; Al-Ahsan, 1986). Namun, dari sejumlah makna yang beragam dan kadang kadang samar ini, istilah umat sejak fase-fase awal Islam telah digunakan untuk melambungkan dan mewujudkan gagasan tentang komunitas Islam dan secara bertahap memperoleh konotasi sosio-legal dan keagamaan. Secara sosiologis, umat menjadi sebuah konsep transformatif, dalam arti bahwa istilah tersebut senantiasa mengalami perubahan peran secara signifikan; pertama, dari "suku-suku Arab" menjadi "komunitas Arab" dan, kemudian,

ketika Islam mulai meluas ke tanah-tanah non-Arab, berubah menjadi "komunitas kaum beriman" yang menyatukan berbagai kelompok Muslim dari segenap wilayah-wilayah Islam.

E. *Cit Cat* di Internet sebagai Arena Konstruksi Budaya

Secara sederhana, penggunaan sosial media di internet dapat didefinisikan sebagai arena percakapan melalui tulisan-tulisan yang dilakukan secara real time melalui system *Computer Mediated Communication* (CMC). Menurut Reid (1993), sistem CMC menggunakan jaringan telekomunikasi dan komputer untuk membentuk, menyimpan, mengirim dan memproses komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa arena internet sebagai tempat untuk mendistribusikan pesan yang isinya tentang gagasan, ide, pengetahuan yang teresonansi dan menyebar dengan cepat. Hal ini kemudian dapat diasumsikan bahwa internet menjadi arena untuk mengkonstruksi budaya-budaya baru, mempelajari budaya baru yang lebih cepat dan *real time*.

Basis dari seluruh aktivitas di internet, khususnya di sosial media ialah mendistribusikan teks, baik itu berupa audio, video, maupun tulisan. Dalam penelitian Danet et al, (1997) berjudul *Characteristic of oral culture in discourse on the net*, John Dcember mencoba bahwa bentuk percakapan dalam CMC ialah bentuk budaya oral yang bertranspormasi menjadi apa yang disebut dengan *tertiary oral culture*, walaupun bentuknya tertulis, secara mental ia bersifat oral. (Danet, 1997). Jika *primary oral culure* didefinisikan secara umum sebagai bentuk pembicaraan yang menghadirkan partisipan dalam satu ruang dan waktu, *face to face*, dan

secondary oral culture, seperti yang disampaikan Walter J Ong, mengejawantahkan melalui perantaraan radio atau televisi, dalam bentuk talk show dan acara-acara yang bersifat interaktif, maka bertukar pesan melalui internet “ngobrol” merupakan perwujudan dari *tertiary oral culture*.

Melalui perbandingan karakteristik *secondary oral culture*-nya Walter J Ong, Jhon Dcember memberikan alasan kenapa CMC dikategorikan sebagai *tertiary oral culture*. Menurutnya, CMC mentransformasikan pemikiran dan budaya yang melahirkan kreasi komunikasi dimana para partisipannya lebih merasa seperti partisipan dalam tradisi kelisanan primer, dapat berpartisipasi secara emosional, ekspresif, dan melibatkan komunikasi yang intim. Dengan gagasan yang serupa, dalam penelitian berjudul chat, felicity Meakins dan E Sean Rintel mengemukakan bahwa saat ini makna chat (ngobrol) mengalami transformasi, dan bentuk ngobrol dalam sehari-hari kemudian dianggap sebagai bentuk komunikasi yang tradisional.

Komunikasi merupakan bagian dari aktivitas budaya. Menurut Geertz secara esensial ialah hal yang bersifat semiotik, berkenaan dengan pencarian makna dan bersifat interpretatif (Gertz, 1973). Budaya merupakan sistem makna yang memberikan signifikansi pada tingkah laku yang mesti diinterpretasi berdasarkan perspektif dari yang melakukannya. Budaya meliputi tidak hanya sistem dan standar yang diadopsi oleh suatu kelompok untuk merasakan, mempercayai, mengevaluasi atau melakukan, tetapi juga meliputi aturan-aturan dan simbol-simbol atas interpretasi dan diskursus yang dipergunakan oleh anggota kelompok. Budaya, masih

menurut Geertz adalah serangkaian mekanisme kontrol, perencanaan, tatanan, aturan, instruksi (yang oleh para *engineer computer* disebut “program”) untuk membangun perintah. Dalam pengertian inilah sosial media membentuk sebuah budaya, sebuah komunitas. Mereka secara umum dihadapkan pada masalah yang diajukan oleh medium yang melekat pada dekonstruksi atas model-model interaksi sosial yang bersifat tradisional: kehadiran atau kedekatan fisik.

Ketidakhadiran secara fisik dalam interaksi sosial media merupakan dekonstruksi atas batas-batas sosial (yang saat ini dianggap) konvensional. Komunitas dan realitas yang dibangun dalam media sosial, memaksa kita mempertimbangkan kembali definisi komunitas dan realitas yang selama ini lazim kita terima. Istilah komunitas biasanya berkaitan dengan kolektifitas, merujuk pada suatu kelompok yang para anggotanya menghuni ruang fisik atau wilayah geografi yang sama di lingkungan tetangga, desa atau kota. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu kelompok yang anggotanya memiliki ciri-ciri yang serupa yang biasanya dihimpun oleh rasa memiliki, atau ikatan dan interaksi sosial tertentu yang menjadikan kelompok tersebut sebagai suatu entitas sosial tersendiri. Misalnya suku bangsa, etnik, golongan tertentu, agama tertentu, dan komunitas profesional. Bagi Ried (2001) landasan terpenting bagi kebersamaan adalah teritori atau wilayah yang sama. Komunitas yang dihasilkan dalam Gerakan sosial online mendekonstruksi pengertian tersebut (Ried, 2001).

Salah satu potensi internet, khususnya sosial media ialah terbentuknya komunitas-komunitas baru, yang Rheingold sebut *virtual community*. Hal

tersebut dimungkinkan oleh sifatnya yang cenderung menghilangkan kehadiran secara fisik. Konsep ini memungkinkan mengubah paradigma tradisional tentang interaksi sosial dan komunitas. Orang-orang dari wilayah yang berbeda dan berjauhan dapat bertemu, berinteraksi langsung, bercakap-cakap, berkenalan dalam sebuah ruang virtual. Dalam tesis Ried (2001), mengatakan bahwa interaksi dalam IRC melibatkan dekonstruksi asumsi tradisional tentang dinamika komunikasi. Bagi Reid, IRC tidak lebih dari sekedar tempat bermain, dimana para penghuninya bebas berekspresi dan merepresentasikan diri dalam sebuah permainan budaya (*culture game*). Mereka tidak membetuk dirinya sendiri untuk berkompromi dengan atau mengikuti konvensi konteks sosial jika bertemu secara tatap muka, melainkan justru bermain dengan budaya baru yang dihasilkannya. Hal yang menarik dari gagasan Reid (2001) adalah kesimpulannya mengenai permainan budaya dalam IRC yang dianggapnya telah mendekonstruksi sarana-sarana sosial berupa kehadiran fisik (*physical proximity*), batas-batas sosial (*social boundaries*), realitas fisik berupa tempat (*place* dan waktu (*time*). Sebagai sebuah fenomena posmodernisme tentunya hal ini menarik dan unik untuk dikaji bagi para peneliti. Bagi Ried, IRC telah menciptakan konsep-konsep baru tentang budaya dan interaksi serta menantang terbentuknya konsep konvensi baru bagi keduanya.

Lebih lanjut Reid mengemukakan bahwa, interaksi dalam IRC memperlihatkan anomaly yang tidak dapat dimengerti. Cara berkomunikasi yang sinkron, tetapi partisipan tidak saling bertemu bahkan tidak saling mengenal satu sama lain. Tidak terdapat konvensi sosial dan konteks sosial,

tetapi pembicaraan dapat sedemikian personal dan terbentuk pula struktur sosial dalam komunitas tersebut. IRC merupakan fenomena sosial, tetapi eksis di 'negara internet' dan artefaknya berupa catatan magnetic. Jika IRC dan CMC secara umum, sungguh-sungguh dianalisis dan dipahami, maka konvensi dari disiplin-disiplin ilmu yang harus didekonstruksi seperti ilmu lingusitik, ilmu komunikasi, sosiologi, antropologi, sejarah, dan beberapa ilmu sosial lainnya mendapatkan tantangan karena hadirnya budaya yang dikembangkan oleh penghuni internet.

Selain konsep tentang *virtual community* yang diungkapkan di atas, konsep realitas juga relevan untuk dijelaskan dalam kaitannya melihat fenomena internet. Dimana konsep realitas yang secara tradisional dikenal selama ini dibatasi oleh konsep ruang dan waktu. Manusia tidak dapat mengalami dua realitas yang berbeda di dalam ruang dan waktu secara simultan, dalam waktu yang bersamaan. Seperti misalnya Jokowi tidak dapat "hidup" di Jakarta dan di Dubai pada waktu yang sama misalnya. (Pialang, 1999). Realitas virtual kemudian dianggap sebagai sebuah "revolusi realitas". Di dalam realitas virtual, orang dapat menjadi subjek yang merdeka, menolak hal yang tidak diinginkan, mengkritik pendapat yang menurutnya tidak masuk akal, memprotes opini yang tidak disukai, mengubah bentuk yang tidak disenangi tanpa menghiraukan norma-norma sosial sebagaimana realitas sesungguhnya. Menurut Rheingold, di dalam realitas virtual, kekuasaan akan menyebar tidak hanya pada segelintir orang, tetapi pada seluruh penghuninya. Di dalamnya setiap orang memiliki

“kekuasaan” untuk menentukan pilihannya, ideologinya, serta merangkai identitasnya yang baru dan unik. (Pialang, 1999).

Penelitian terkait dengan internet juga dilakukan oleh Eni Maryani (1998), dimana hasil penelitiannya menggambarkan tentang bagaimana pemanfaatan atas munculnya ruang public di internet. Tesis ini fokus pada tahun-tahun awal internet sedemikian berpengaruh pada proses pembentukan wacana yang berkenaan dengan kondisi sosial politik di Indonesia pada saat itu. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Yusminovita (2001), ia mencoba mengeloabirasi komunikasi pribadi yang dapat terjalin melalui IRC, dan bagaimana simbol-simbol komunikasi dapat digunakan dalam interaksi tersebut. Selain itu, penelitian senada dari Hikmat Budiman (2003), melakukan studi tentang kekuasaan dan kebebasan dalam cyberspace. Sebuah upaya melihat beberapa kontraksi di internet.

Berdasarkan uraian penelitian di atas, penelitian ini mencoba untuk melihat aspek politik identitas di sosial media di internet pada konteks pemilihan presiden republik Indonesia pada tahun 2019. Bahwa ruang publik di internet menjadi arena pertarungan yang sengit bagi para pendukung calon presiden. Hal ini menunjukkan bahwa penetrasi penggunaan internet di Indonesia semakin tinggi, adopsi teknologi komunikasi di masyarakat Indonesia menjadi anomali literasi, yang liar, tanpa norma, kasar, dan bengis. Oleh karena itu, peneliti kemudian tertarik untuk melihat seberapa besar konstruksi keummatan bagi para pendukung untuk membentuk opini publik bahwa siapa yang lebih dekat dengan islam di sosial media.

